



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan

Triwulan IV 2015

Equity Tower Lt 20, 21 & 39
Sudirman Central Business District
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53
Jakarta 12190

Ringkasan Laporan

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan membaik dari 4,8% pada tahun 2015 menjadi 5,3% pada tahun 2016, terutama berasal dari kenaikan permintaan domestik.
- Rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2016 diprediksi stabil pada kisaran Rp 14.000/US\$.
- Rata-rata inflasi diprediksi mencapai 4,3% pada tahun 2016 dengan posisi akhir tahun di 4,5%. BI rate pada akhir tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7,5%.
- Pendirian LPS dilatarbelakangi oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang memberikan dampak negatif yang besar bagi perekonomian khususnya industri perbankan.
- LPS memiliki fungsi sebagai *loss minimizer* sesuai dengan mandat Undang-Undang yaitu turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
- Dengan kinerja, peran, serta fungsi LPS selama 10 tahun ini, LPS akan menghadapi sejumlah tantangan ke depannya, seperti skema penjaminan yang kredibel, pilihan resolusi yang cepat, efektif dan efisien, serta koordinasi dengan lembaga keuangan lain dalam FKSSK.
- Penyaluran kredit perbankan tumbuh 10,27% y/y pada bulan Oktober 2015, turun 73 bps dibandingkan bulan sebelumnya. Ini adalah penurunan terendah kedua setelah pertumbuhan pertengahan tahun sempat menyentuh angka di bawah 10%.
- Turunnya pertumbuhan nominal NPL terutama didorong oleh turunnya pertumbuhan kolektibilitas “Diragukan” yang selama ini meningkat signifikan dalam 12 bulan terakhir.
- Dari penilaian sementara, Indeks Stabilitas Perbankan (Banking Stability Index, BSI) LPS dalam observasi bulan November 2015 berada pada level 100,51 yang menunjukkan bahwa kondisi risiko industri perbankan Indonesia berada dalam status “Normal”.

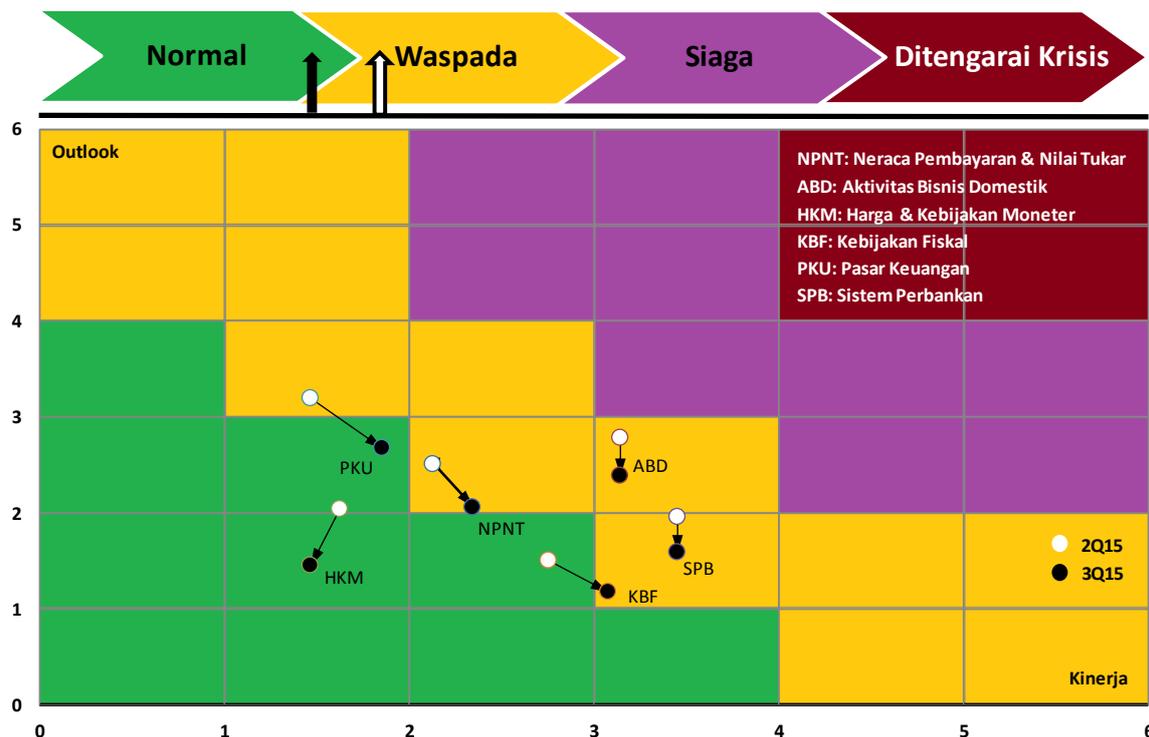
Update Risiko serta Prospek Perekonomian dan Sistem Keuangan

Update Risiko serta Prospek Perekonomian dan Sistem Keuangan

Moch. Doddy Ariefianto, Seto Wardono

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan membaik dari 4,8% pada tahun 2015 menjadi 5,3% pada tahun 2016, terutama berasal dari kenaikan permintaan domestik.
- Rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2016 diprediksi stabil pada kisaran Rp 14.000/US\$.
- Rata-rata inflasi diprediksi mencapai 4,3% pada tahun 2016 dengan posisi akhir tahun di 4,5%. BI rate pada akhir tahun 2016 diproyeksikan sebesar 7,5%.

Kami telah melakukan *updating* terhadap profil risiko serta prospek perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Ekonomi dan sistem keuangan Indonesia pada kuartal III 2015 secara kualitatif membaik ke status normal dari kondisi waspada pada kuartal sebelumnya. Perbaikan kondisi ini terutama dilatarbelakangi oleh perubahan prospek dari semua aspek yang kami pantau ke arah yang lebih baik. Meski mengalami perbaikan prospek pada kuartal III, tercatat ada tiga aspek yang mengalami pelemahan kinerja pada periode tersebut, yaitu aspek neraca pembayaran dan nilai tukar, aspek kebijakan fiskal, dan aspek pasar keuangan. Kinerja aspek aktivitas bisnis domestik dan aspek sistem perbankan relatif stabil jika dibandingkan dengan kondisi di kuartal II 2015. Sebaliknya, kinerja aspek harga dan kebijakan moneter membaik sejalan dengan penurunan inflasi.



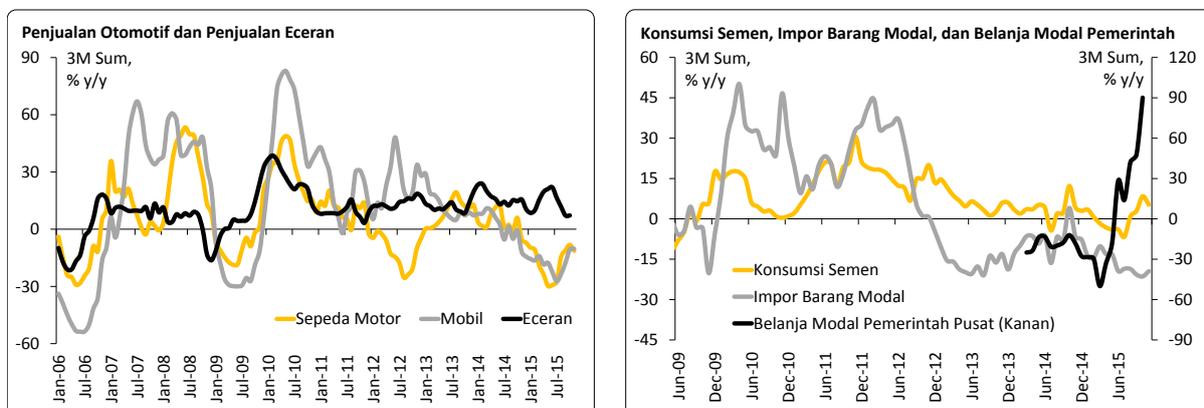
Sumber: LPS

Gambar 1. Peta Risiko Kualitatif Perekonomian dan Sistem Keuangan

Aktivitas Bisnis Domestik

Pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak berubah menjelaskan kinerja aspek aktivitas bisnis domestik yang stabil pada kuartal III 2015. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 4,73% y/y pada kuartal III, sedikit di atas pertumbuhan kuartal II yang sebesar 4,67%. Percepatan pertumbuhan ekonomi ini ditunjang oleh perbaikan komponen permintaan domestik. Secara kumulatif, kontribusi komponen permintaan domestik terhadap pertumbuhan y/y PDB pada kuartal III mencapai 4,39 poin persentase (ppts), melebihi kontribusi pada kuartal II yang sebesar 3,07 ppts. Hal ini sejalan dengan terjadinya percepatan pertumbuhan investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto atau PMTB), konsumsi pemerintah, dan konsumsi lembaga non-profit rumah tangga. Berbeda dengan permintaan domestik, komponen permintaan eksternal secara neto malah mengalami pelemahan pada kuartal III 2015, selaras dengan aktivitas ekonomi global yang masih lemah. Secara keseluruhan, sektor eksternal menyumbang 1,17 ppts bagi pertumbuhan y/y PDB pada kuartal III, lebih rendah dari andil di kuartal sebelumnya yang sebesar 1,64 ppts.

Prospek aktivitas bisnis domestik mengalami perbaikan dalam jangka pendek, sejalan dengan ekspektasi berlanjutnya pemulihan pertumbuhan ekonomi. Data bulanan terkini masih menunjukkan adanya tekanan pada konsumsi swasta. Meski demikian, investasi diperkirakan terus membaik, antara lain didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah di akhir tahun. Mengikuti pola musimannya, konsumsi pemerintah diperkirakan juga terus membaik pada kuartal IV. Di sisi lain, komponen permintaan eksternal tampak melemah, terindikasi dari munculnya defisit perdagangan sebesar US\$ 346,4 juta pada November 2015. Ini adalah defisit bulanan yang pertama selama setahun terakhir.



Sumber: Astra International, BI, CEIC, Kementerian Keuangan

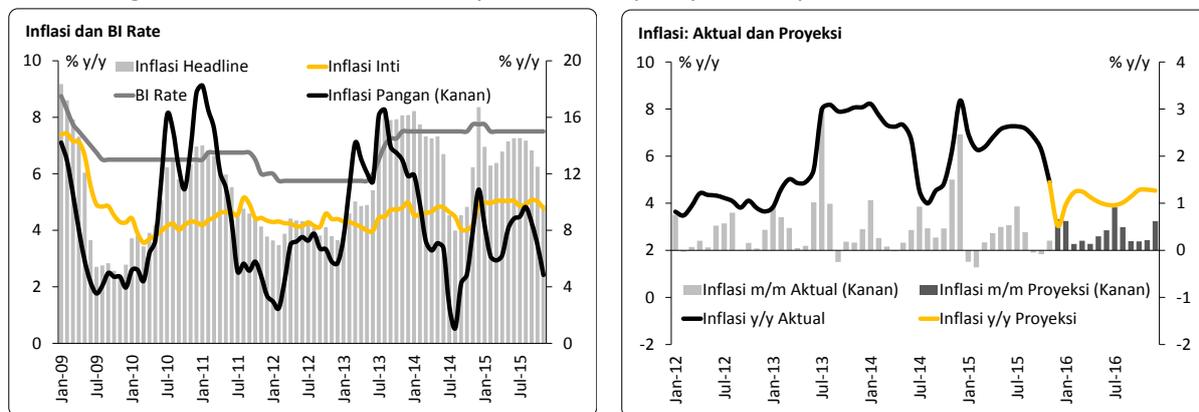
Gambar 2. Perkembangan Indikator Konsumsi dan Investasi

Kami mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 dan 2016 di posisi 4,8% dan 5,3%. Percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diperkirakan bersumber dari berlanjutnya pemulihan permintaan domestik sebagai akibat dari kebijakan moneter dan fiskal yang akomodatif. Penurunan giro wajib minimum (GWM) primer rupiah yang terealisasi pada Desember 2015 akan menambah kapasitas bank untuk menyalurkan kredit lebih banyak ke sektor riil pada tahun 2016. Di sisi fiskal, alokasi belanja infrastruktur yang tinggi dan melebihi alokasi tahun

2015 akan menjadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan PMTB. Di sisi lain, masih ada *downside risks* yang dapat menghalangi pemulihan aktivitas ekonomi pada tahun 2016, seperti volatilitas arus modal dan nilai tukar yang diperkirakan masih cukup tinggi, perlambatan ekonomi China yang menjadi mitra dagang utama Indonesia, serta harga komoditas yang masih rendah.

Harga dan Kebijakan Moneter

Harga dan kebijakan moneter adalah satu-satunya aspek yang sekaligus mengalami perbaikan kinerja dan prospek. Inflasi y/y turun dari 7,26% pada Juni 2015 menjadi 6,83% pada September 2015, sejalan dengan pelemahan tekanan pada tingkat harga di segmen bahan makanan, makanan jadi, dan perumahan. Inflasi kemudian terus bergerak ke bawah hingga mencapai 4,89% pada bulan November akibat hilangnya pengaruh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada satu tahun sebelumnya. Sementara, tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang masih sangat kuat pada kuartal III mendorong Bank Indonesia untuk mempertahankan *policy rate* di posisi 7,50%.



Sumber: BI, BPS, LPS

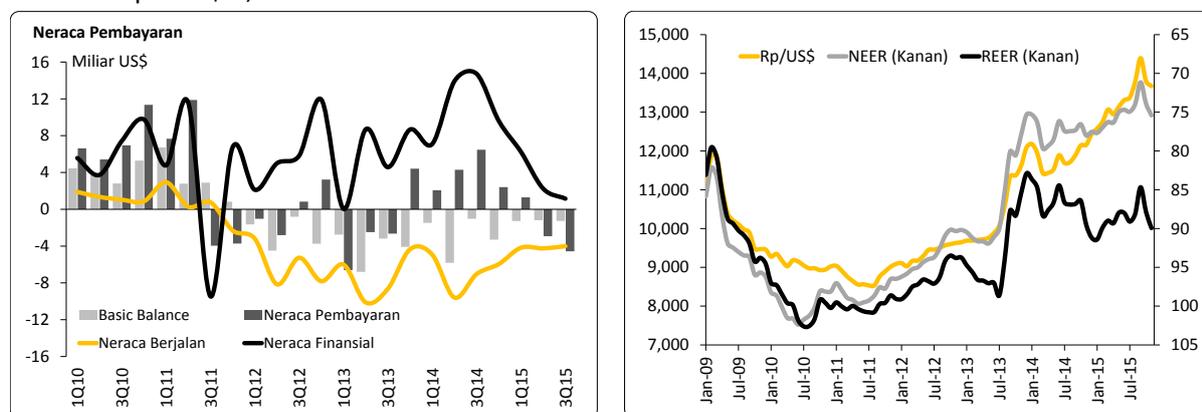
Gambar 3. Perkembangan dan Prospek Inflasi

Kami melihat perbaikan pada prospek harga dan kebijakan moneter dalam jangka pendek ke depan, terutama dilatarbelakangi oleh pudarnya beberapa risiko inflasi yang sebelumnya dinilai cukup penting. El Nino, yang telah terjadi sejak Maret 2015, diperkirakan akan berakhir pada Mei 2016 sehingga akan mengurangi tekanan terhadap harga pangan. Secara historis, hilangnya El Nino dapat mengurangi inflasi m/m di segmen pangan (bahan makanan dan makanan jadi) sebesar rata-rata 0,26 ppts. Selain El Nino, risiko yang berasal dari potensi kenaikan harga BBM juga berkurang. Sebaliknya, pemerintah malah akan menurunkan harga bensin jenis Premium dan harga minyak solar pada awal Januari 2016. Di sisi lain, penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA akan menjadi salah satu risiko inflasi pada tahun 2016. Menurut kalkulasi kami, kebijakan ini akan menambah inflasi tahun 2016 sebesar 0,24 ppts. Pada tahun 2016, rata-rata inflasi kami perkirakan mencapai 4,3%, lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya yang sebesar 5,4% dan di bawah estimasi rata-rata inflasi tahun 2015 yang sebesar 6,4%. Inflasi pada akhir 2016 diproyeksikan sebesar 4,5%, melebihi estimasi inflasi akhir 2015 yang sebesar 3%.

Perkiraan penurunan inflasi y/y hingga ke posisi 3% serta penurunan defisit neraca berjalan ke level 2% PDB pada tahun 2015 menunjukkan adanya ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk memangkas *policy rate* pada awal tahun 2016. Meski demikian, realisasi penurunan suku bunga kali ini akan sangat tergantung pada stabilitas di sektor finansial, terutama nilai tukar rupiah. Kami sendiri melihat potensi yang cukup besar bagi BI rate untuk diturunkan pada kuartal I 2016, memanfaatkan kondisi ekonomi makro yang relatif baik. Akan tetapi, bila ini terjadi, kami juga melihat kemungkinan pembalikan arah suku bunga ke atas pada semester II 2016 sebagai respons atas naiknya gejolak di pasar keuangan. Sumber utama gejolak ini adalah suatu peristiwa yang disebut sebagai “triple taper tantrum”, di mana Bank Sentral Eropa (ECB) dan Bank Sentral Jepang (BOJ) akan mulai mengurangi, atau setidaknya melempar wacana pengurangan, stimulus moneternya saat Federal Reserve (the Fed) berada dalam fase menaikkan suku bunganya. Jika ini benar terjadi, rupiah akan mengalami tekanan yang sangat kuat, sehingga BI rate mungkin akan perlu dinaikkan. Melihat hal ini, kami memprediksi BI rate di posisi 7,50% pada akhir tahun 2016.

Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar

Kinerja aspek neraca pembayaran dan nilai tukar melemah, dilatarbelakangi oleh peningkatan defisit neraca pembayaran dan pelemahan rupiah pada kuartal III 2015. Defisit neraca pembayaran pada kuartal III mencapai US\$ 4,57 miliar, melebihi defisit kuartal sebelumnya yang sebesar US\$ 2,93 miliar. Pelebaran defisit ini terjadi akibat penurunan surplus neraca finansial dari US\$ 2,25 miliar menjadi US\$ 1,15 miliar yang sejalan dengan arus keluar modal asing dari pasar saham dan obligasi korporasi domestik. Ini terjadi bersamaan dengan penurunan defisit neraca berjalan dari US\$ 4,25 miliar sampai US\$ 4,01 miliar.



Sumber: BI, BPS, LPS

Gambar 4. Neraca Pembayaran dan Nilai Tukar Rupiah

Rupiah menghadapi tekanan yang sangat kuat pada kuartal III akibat sentimen normalisasi kebijakan moneter the Fed dan devaluasi yuan. Rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp 13.868/US\$ pada kuartal III, melemah 5,59% dari kuartal sebelumnya. Secara *point to point*, rupiah bahkan terdepresiasi hampir 10% ke level Rp 14.657/US\$ pada akhir kuartal III. Secara nominal, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap satu keranjang mata uang lain (nilai tukar efektif nominal atau NEER) juga

melemah 2,65% pada periode yang sama. Sedangkan, setelah memperhitungkan inflasi (nilai tukar efektif riil atau REER) rupiah mengalami depresiasi 1,27% terhadap berbagai mata uang.

Ekspektasi perbaikan pada neraca finansial dan apresiasi nilai tukar rupiah pada kuartal IV 2015 mendasari perbaikan prospek neraca pembayaran dan nilai tukar. Pada kuartal ini, neraca modal dan finansial lain diperkirakan membaik sesuai dengan pola musimannya. Faktor ini, ditambah dengan pembelian surat berharga negara (SBN) oleh investor asing yang masih terjadi, akan meningkatkan surplus neraca modal dan finansial secara signifikan. Sebaliknya, pola musiman juga mengindikasikan peningkatan defisit neraca berjalan pada kuartal IV 2015. Sementara, data hingga 21 Desember 2015 mengkonfirmasi penguatan nilai rupiah dari posisi kuartal III. Rata-rata nilai tukar rupiah pada periode 1 Oktober–21 Desember 2015 mencapai Rp 13.782/US\$, menguat dari Rp 13.868/US\$ pada kuartal III. Dalam jangka pendek, potensi penguatan rupiah bersumber dari turunnya ketidakpastian eksternal setelah the Fed merealisasikan kenaikan suku bunga pada 16 Desember 2015.

	2012	2013	2014	2015P	2016P	2017P
Transaksi Berjalan	-24,418	-29,115	-27,516	-17,517	-20,753	-25,087
Barang	8,680	5,833	6,983	14,293	10,782	8,185
Ekspor	187,346	182,089	175,293	150,438	143,610	144,603
Impor	-178,667	-176,256	-168,310	-136,145	-132,828	-136,418
Jasa-Jasa	-10,564	-12,072	-10,010	-8,486	-7,853	-8,183
Pendapatan Primer	-26,628	-27,055	-29,708	-29,071	-29,673	-31,188
Pendapatan Sekunder	4,094	4,178	5,220	5,748	5,991	6,099
Transaksi Modal dan Finansial	24,909	22,010	45,367	14,856	25,967	33,274
Investasi Langsung	13,716	12,295	15,890	12,626	14,117	14,891
Investasi Portofolio	9,206	10,875	26,143	11,676	12,509	14,140
Transaksi Modal dan Finansial Lain	1,986	-1,161	3,334	-9,446	-659	4,243
Neraca Keseluruhan	215	-7,325	15,249	-6,050	5,214	8,187
Memorandum:						
Cadangan Devisa (akhir periode)	112,781	99,387	111,862	101,857	104,351	110,142
Transaksi Berjalan (% PDB)	-2.7	-3.2	-3.1	-2.0	-2.3	-2.5

Sumber: BI, LPS

Tabel 1. Neraca Pembayaran: Aktual dan Proyeksi (Juta US\$)

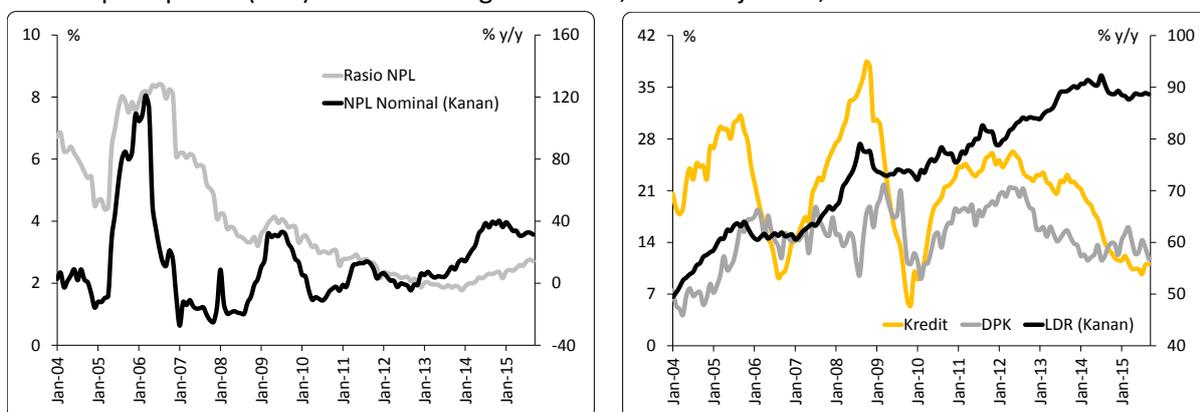
Kami merevisi perkiraan defisit neraca berjalan tahun 2016 dari US\$ 20,6 miliar (2,2% PDB) menjadi US\$ 20,8 miliar (2,3% PDB). Pada tahun 2017, defisit neraca berjalan diprediksi meningkat ke US\$ 25,1 miliar (2,5% PDB). Potensi pelebaran defisit neraca berjalan pada tahun 2016 bersumber dari ekspektasi penurunan surplus neraca perdagangan. Sementara, kami melihat adanya perbaikan pada neraca modal dan finansial di tahun 2016, sejalan dengan turunnya ketidakpastian di pasar keuangan global setelah the Fed menaikkan suku bunga. Dengan perkembangan ini, cadangan devisa

diprediksi mencapai US\$ 104,4 miliar pada akhir tahun 2016, jauh lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya yang sebesar US\$ 114,3 miliar.

Pada tahun 2016, rata-rata nilai tukar rupiah kami perkirakan mencapai Rp 14.000/US\$, sama dengan perkiraan kami sebelumnya. Kami juga tidak mengubah proyeksi nilai tukar pada akhir tahun 2016 di posisi Rp 14.000/US\$. *Downside risks* bagi rupiah terutama berasal dari potensi *capital outflow* akibat perilaku *risk aversion* investor global dalam menyikapi normalisasi kebijakan moneter the Fed, ECB, dan BOJ yang dapat terjadi secara bersamaan pada semester II 2016 atau semester I 2017. Sebaliknya, *upside risks* bagi rupiah bersumber dari potensi perbaikan neraca pembayaran serta respons positif investor asing dalam menyikapi berbagai kebijakan reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah.

Sistem Perbankan

Secara kualitatif, kinerja aspek sistem perbankan bisa dikatakan tidak mengalami perubahan pada kuartal III 2015 karena pelemahan kualitas kredit diimbangi oleh perbaikan profitabilitas dan rasio permodalan. Rasio kredit bermasalah (NPL) bruto naik dari 2,56% pada kuartal II menjadi 2,71% pada kuartal III, yang tertinggi selama lebih dari empat tahun. Meski demikian, pada periode yang sama, *return on asset* (ROA) sedikit meningkat dari 2,29% menjadi 2,31%, sedangkan rasio kecukupan modal (CAR) naik dari 20,28% menjadi 20,62%. Selain itu, sistem perbankan nasional juga mengalami percepatan pertumbuhan kredit, meski dengan dana pihak ketiga (DPK) yang melambat. Kredit naik 11,1% y/y pada kuartal III, melebihi pertumbuhan 10,38% pada kuartal II. Pertumbuhan y/y DPK pada saat yang sama melambat dari 12,65% ke 11,72%. Dengan demikian, rasio kredit terhadap simpanan (LDR) sedikit meningkat dari 88,62% menjadi 88,63%.



Sumber: BI, CEIC, LPS

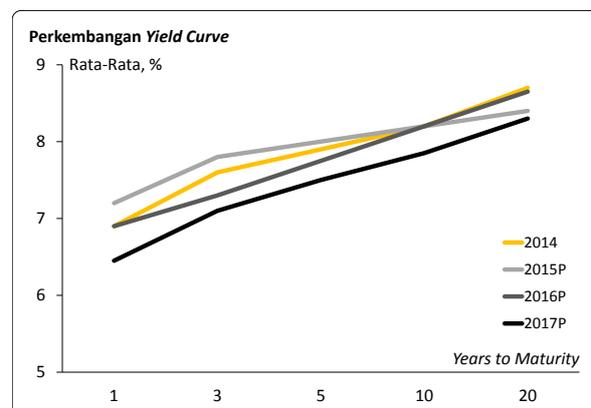
Gambar 5. NPL, Kredit, dan DPK Perbankan

Prospek sistem perbankan mengalami perbaikan, didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi dan pelonggaran kebijakan moneter. Perbaikan aktivitas ekonomi ke depan, jika dibarengi oleh kondisi pasar keuangan yang makin stabil, akan meningkatkan permintaan terhadap kredit dan profitabilitas serta memperbaiki kualitas kredit. Pertumbuhan kredit juga akan ditopang oleh pelonggaran rasio GWM primer dalam rupiah sebesar 50 bps yang mulai berlaku pada awal

Desember 2015. Kredit perbankan kami perkirakan tumbuh 13% pada tahun 2016, lebih rendah dari perkiraan kami sebelumnya yang sebesar 13,8%. Meski demikian, angka itu masih di atas estimasi pertumbuhan kredit tahun 2015 yang berada di posisi 11,7%. Kami juga merevisi proyeksi pertumbuhan DPK tahun 2016 dari 12,1% menjadi 12,3%. Angka ini masih berada di bawah perkiraan pertumbuhan DPK tahun 2015 yang sebesar 12,7%.

Pasar Keuangan

Berlanjutnya penurunan harga saham dan indeks surat utang negara (SUN) serta kenaikan *credit default swap* (CDS) menjelaskan pelemahan kinerja aspek pasar keuangan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) secara *point to point* turun hampir 14% q/q pada kuartal III 2015 akibat maraknya aksi jual oleh investor asing. Penjualan bersih (*net sell*) pemodal asing pada kuartal itu mencapai Rp 16,87 triliun, jauh melebihi *net sell* kuartal II yang sebanyak Rp 1,65 triliun. Aksi jual yang dilakukan investor asing juga mendorong peningkatan *yield* SUN. SUN bertenor 10 tahun, misalnya, mengalami kenaikan *yield* sebanyak 127 bps pada kuartal III. Peningkatan *yield* ini juga tercermin dari penurunan indeks IDMA sebesar 7,17% pada waktu yang sama. *Capital outflow* yang terjadi di pasar saham dan SUN terjadi sejalan dengan turunnya persepsi investor asing terhadap risiko berinvestasi di Indonesia. Ini terlihat dari lonjakan CDS bertenor lima tahun dari 173,29 pada akhir Juni menjadi 270 pada akhir September 2015.



Sumber: Bloomberg, LPS

Gambar 6. Perkembangan *Yield* SUN: Aktual dan Proyeksi

Beberapa indikator mengkonfirmasi perbaikan prospek pasar keuangan dalam jangka pendek ke depan. Penurunan CDS pada periode Oktober–November 2015 mengindikasikan pulihnya persepsi berinvestasi di Indonesia. Sedangkan, indeks VIX juga sudah turun cukup banyak, mencerminkan turunnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kenaikan Fed rate pada 16 Desember 2015 adalah salah satu faktor penting yang memicu penurunan ketidakpastian di pasar keuangan global. Pada kuartal IV, investor asing juga mengurangi tekanan jualnya di pasar saham. Pada periode 1 Oktober–21 Desember 2015, investor asing masih membukukan *net sell* sebesar Rp 9,45 triliun, namun angka ini masih jauh di bawah *net sell* kuartal III yang sebesar Rp 16,87 triliun.



Pada periode yang sama, kepemilikan asing atas surat berharga negara (SBN) rupiah malah meningkat Rp 24,27 triliun, setelah mengalami penurunan sejumlah Rp 14,16 triliun pada kuartal III.

Kami memproyeksikan rata-rata *yield* SUN bertenor 10 tahun di posisi 8,2% pada tahun 2016, tidak berubah dari proyeksi kami sebelumnya dan perkiraan rata-rata *yield* di tahun 2015. Akan tetapi, kami melihat potensi penurunan *yield* pada seri-seri SUN dengan tenor di bawah 10 tahun. Rata-rata *yield* SUN bertenor lima tahun, misalnya, diperkirakan turun dari 8% menjadi 7,8%. Sebaliknya, *yield* SUN dengan tenor di atas 10 tahun akan meningkat, sehingga bisa dikatakan bahwa kurva imbal hasil (*yield curve*) akan mengalami *steepening* (makin curam) pada tahun 2016. Kondisi ini mencerminkan ekspektasi akan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kebijakan Fiskal

Berlanjutnya pelemahan penerimaan negara serta kenaikan defisit anggaran dan rasio utang pemerintah menjelaskan pelemahan kinerja aspek kebijakan fiskal. Penerimaan negara turun 12,63% y/y pada kuartal III 2015, melebihi penurunan 9,44% pada kuartal II dan menjadi penurunan terbesar selama enam tahun. Kondisi ini berimbas pada kenaikan defisit anggaran. Realisasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tiga kuartal pertama tahun 2015 mencapai Rp 259,18 triliun atau 3,02% PDB. Angka ini jauh melebihi realisasi defisit APBN sebesar Rp 153,36 triliun atau 1,95% PDB pada periode yang sama di tahun 2014. Sementara, rasio utang pemerintah terhadap PDB juga meningkat dari 25,99% pada kuartal II menjadi 27,44% pada kuartal III 2015.

Prospek aspek kebijakan fiskal mengalami perbaikan, didukung oleh ekspektasi kami bahwa pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk mencegah pelebaran defisit anggaran hingga melewati batas toleransi berdasarkan undang-undang (3% PDB). Risiko fiskal pada tahun 2016 kami pandang lebih kecil dibandingkan pada tahun ini mengingat penetapan berbagai target dan asumsi yang lebih konservatif. Target penerimaan pajak, misalnya, ditetapkan hanya 3,9% lebih tinggi dibandingkan target APBN-P 2015. Angka ini jauh lebih kecil daripada target pertumbuhan penerimaan pajak pada APBN-P 2015 yang sebesar 19,52%. Defisit anggaran pemerintah pusat kami perkirakan mencapai 2,4% PDB pada tahun 2016 atau sama dengan perkiraan defisit tahun 2015.

10 Tahun LPS: Review, Kinerja, Peran, dan Tantangan

10 Tahun LPS: Review Kinerja, Peran, dan Tantangan

Moch. Doddy Ariefianto, Dienda Siti Rufaedah, Citra Amanda

- Pendirian LPS dilatarbelakangi oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang memberikan dampak negatif yang besar bagi perekonomian khususnya industri perbankan.
- LPS memiliki fungsi sebagai *loss minimizer* sesuai dengan mandat Undang-Undang yaitu turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
- Dengan kinerja, peran, serta fungsi LPS selama 10 tahun ini, LPS akan menghadapi sejumlah tantangan ke depannya, seperti skema penjaminan yang kredibel, pilihan resolusi yang cepat, efektif dan efisien, serta koordinasi dengan lembaga keuangan lain dalam FKSSK.

Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia dilatarbelakangi oleh krisis moneter pada tahun 1997-1998 yang memberikan dampak negatif yang besar bagi perekonomian khususnya industri perbankan. Kepercayaan masyarakat kepada perbankan hilang sehingga masyarakat menarik dananya secara besar-besaran dari bank (*bank runs*). Hal ini yang mengakibatkan kondisi likuiditas perbankan mengering dan menyebabkan ditutupnya 16 bank oleh Bank Indonesia.

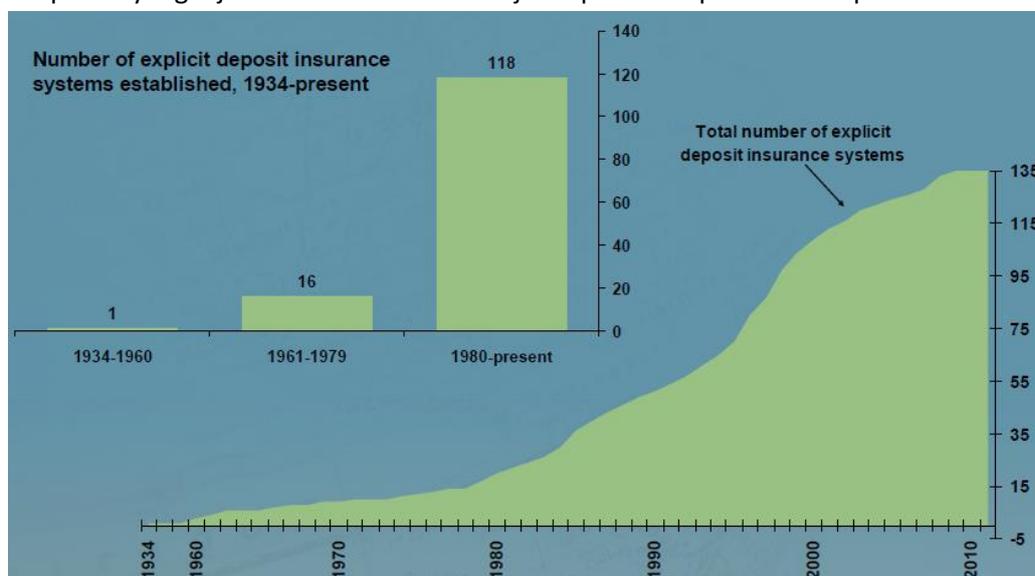
Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meminimalkan kepanikan masyarakat pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank umum (*blanket guarantee*). Dengan kebijakan *blanket guarantee* ini, pemerintah menjamin pembayaran terhadap seluruh kewajiban bank, termasuk pembayaran simpanan masyarakat di bank jika suatu bank dilikuidasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan.

Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas untuk melakukan penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, penyelesaian kewajiban bank yang ditutup, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Pada tahun 2004, BPPN dibubarkan dan pembubaran ini melatarbelakangi dibentuknya LPS.

Dengan adanya kebijakan *blanket guarantee*, masyarakat diharapkan tak lagi khawatir menyimpan uangnya di bank. Karena apabila terjadi krisis pada suatu bank, uang masyarakat akan tetap aman dan mendapat jaminan pengembalian dari pemerintah. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat namun membebankan anggaran negara karena tidak terbatasnya eksposur penjaminan. Model *blanket guarantee* juga dapat memicu timbulnya *moral hazard* baik dari pihak pengelola bank maupun dari nasabah. Manajemen bank dapat mengelola bank dengan tidak hati-hati misalnya dengan memberikan bunga simpanan tinggi dan memberikan kredit dengan origination standard yang rendah. Para nasabah bank juga tidak terdorong untuk peduli terhadap kondisi keuangan bank karena mengetahui simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Sistem *blanket guarantee* ini kurang mendorong terciptanya disiplin pasar.

Dengan banyak pertimbangan maka skema penjaminan tetap harus memperhatikan risiko beban anggaran negara dan *moral hazard* yang mungkin timbul. Dalam praktiknya, sistem penjaminan di negara-negara lain banyak dilakukan dengan cara dibatasi penjaminannya (*limited guarantee*) atau penjaminan simpanan nasabah bank sampai jumlah tertentu. Pembatasan jaminan

ini bertujuan untuk meminimalkan risiko *moral hazard* dan meningkatkan disiplin pasar. Selain dengan skema ini, risiko terhadap anggaran negara lebih ringan daripada sistem *blanket guarantee*. Dalam Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004, simpanan yang dijamin LPS ditetapkan sebesar Rp 100 juta dengan pertimbangan utama rekening bersaldo sampai jumlah tersebut telah mencapai lebih dari 98% dari jumlah seluruh rekening yang ada pada perbankan. Pada saat terjadi krisis keuangan global pada paruh kedua 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 3 Tahun 2008 melakukan amendemen Undang-Undang LPS dengan menambah prasyarat adanya ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan, untuk melakukan perubahan nilai simpanan yang dijamin. Berdasarkan amendemen tersebut, nilai simpanan yang dijamin LPS dinaikkan menjadi Rp 2 miliar per nasabah per bank.



Sumber: Carns (2011)

Gambar 7. Perkembangan Institusi Penjamin Simpanan 1934-sekarang

Penjaminan simpanan di Indonesia berperan sangat penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Belajar dari pengalaman krisis perbankan nasional tahun 1997/1998, penjaminan simpanan bagi deposan kecil akan sangat mempengaruhi berbagai upaya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Sedangkan untuk deposan besar yang jumlah simpanannya melebihi batas penjaminan diharapkan terdorong untuk rajin menilai kondisi kesehatan bank, sehingga disiplin pasar pada industri perbankan tetap dapat terjaga.

Perkembangan lembaga penjaminan simpanan di dunia mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama sejak tahun 1980. Era 1980-2000 adalah suatu periode turbulensi pada perekonomian dan sistem keuangan. Pada periode tersebut banyak terjadi krisis ekonomi-finansial besar seperti Latin American Debt Crisis, Tequila Crisis (Meksiko), LTCM, dan Asian Crisis. Dalam artikel "The Role of Deposit Insurance Schemes in The Financial Safety Net" (Carns, 2011) disebutkan bahwa peran lembaga penjamin adalah sebagai salah satu jaring pengaman sistem keuangan dan untuk menjaga stabilitas keuangan.

Lembaga penjaminan simpanan dengan skala nasional pertama kali didirikan di Amerika Serikat: Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) yang mulai beroperasi pada tahun 1934. Dalam rentang periode yang cukup lama, jumlah Institusi Penjamin Simpanan (IPS) baru meningkat menjadi 16 lembaga pada tahun 1961-1979. Pada tahun 1980 hingga sekarang, jumlah lembaga penjaminan simpanan di dunia mencapai 118, hal ini dilatarbelakangi oleh krisis perbankan yang melanda sejumlah negara di dunia yang pada akhirnya untuk meminimalkan kepanikan masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di negaranya, negara-negara di dunia membentuk lembaga penjaminan simpanan. Pengalaman telah mengajarkan bahwa IPS memberikan kepercayaan penting, terutama selama masa krisis. Melihat pengalaman di Amerika Serikat, sistem IPS terbukti sangat efektif dalam mencegah *bank runs* selama krisis.

Undang-Undang LPS diundangkan tanggal 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan setelah diundangkan yaitu tanggal 22 September 2005. Dengan berlaku efektifnya Undang-Undang LPS, maka LPS mulai beroperasi secara penuh sejak tanggal 22 September 2005.

Penjaminan simpanan mempunyai fungsi untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan penjaminan simpanan dapat meminimalkan potensi *bank runs* karena kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat. Posisi IPS adalah sebagai anggota jaring pengaman sistem keuangan. Peran LPS adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada perbankan dan fungsi LPS sendiri adalah menjamin simpanan nasabah serta turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Pelaksanaan skim penjaminan simpanan oleh LPS ini diterapkan kepada seluruh bank yang beroperasi di Indonesia, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik bank konvensional maupun bank syariah. Dalam menjalankan kedua fungsi di atas, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

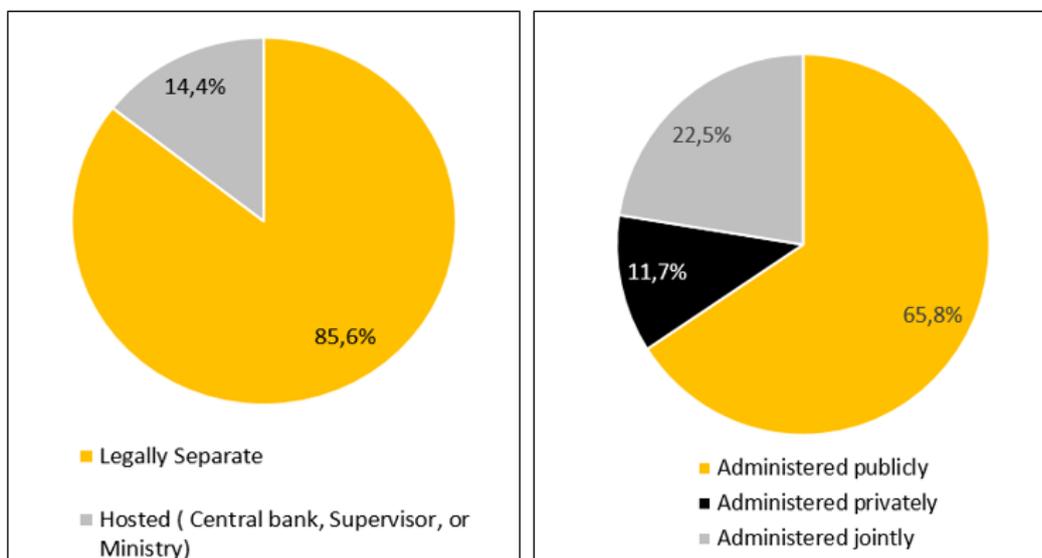
1. melaksanakan penjaminan simpanan;
2. melaksanakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
3. melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Dalam menjalankan tugas di atas, LPS mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip "industri menolong industri", dimana apabila terjadi bank gagal, maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan. Untuk mendukung maksud tersebut, seluruh bank wajib membayar kontribusi dan premi kepada LPS. Dalam rangka pelaksanaan penjaminan simpanan, LPS melakukan pembayaran klaim terhadap simpanan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya serta melakukan proses likuidasi bank yang dicabut izin usahanya.

Kajian teoritis oleh Sargent (2012) menyatakan bahwa kebijakan fiskal dan/atau moneter akan efektif bila diikuti dengan ekspektasi pasar yang sejalan. Pada saat krisis, regulator khususnya dalam perbankan harus mampu menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan hasil yang setara dengan biaya (*cost*) yang timbul. Dalam artikel "Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity" (Diamond dan Dybvig, 1983) dijelaskan bahwa eksistensi lembaga penjaminan simpanan ditujukan untuk mencegah *bank runs*. *Bank runs* ditandai dengan "*self-fulfilling prophecy*" dimana turunnya kepercayaan deposan dapat menimbulkan krisis perbankan. Permasalahan ini disebabkan dua faktor yaitu terdapat informasi asimetrik antara deposan dan manajemen bank, serta nasabah yang kurang mampu menilai kesehatan bank.

Di sisi lain, Karaken dan Wallace (1977) dalam artikel “Deposit Insurance and Bank regulation: A Partial-Equilibrium Exposition” menegaskan adanya *moral hazard* dan disiplin pasar yang rendah dalam sistem *blanket guarantee*. Demirguc-Kunt dan Detragiache (2002) menyatakan bahwa ketidakdisiplinan pasar didorong oleh ketidakdisiplinan para nasabah penyimpan, pengelola dan pemilik bank serta *stakeholders* lainnya. Selain itu tujuan pendirian IPS bukan hanya untuk melindungi deposan kecil, melainkan lebih kepada mendorong secara sistem agar bank menjalankan fungsi intermediasinya dengan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang, fungsi LPS adalah turut aktif menjaga stabilitas perbankan nasional. LPS juga memiliki tugas untuk menyelamatkan bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam rangka menjalankan tugas dimaksud, LPS memiliki kewenangan dalam mengambil alih dan menjalankan semua hak dan pemegang saham. Selain itu, LPS juga punya kewenangan untuk menguasai aset, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal. Kewenangan tersebut diberikan Undang-Undang kepada LPS untuk memastikan proses penyelamatan bank yang dilakukan oleh LPS dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam proses pengambilan keputusan penyelamatan bank gagal yang tidak berdampak sistemik, LPS memiliki pilihan untuk menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank gagal tersebut. Opsi tersebut didasarkan pada suatu rasio antara perkiraan biaya penyelamatan dan perkiraan biaya tidak melakukan penyelamatan bank gagal dimaksud. Sedangkan untuk bank gagal yang berdampak sistemik, proses pengambilan keputusan penyelamatan berada pada FKSSK. LPS hanya bertugas melaksanakan keputusan yang dihasilkan oleh FKSSK.

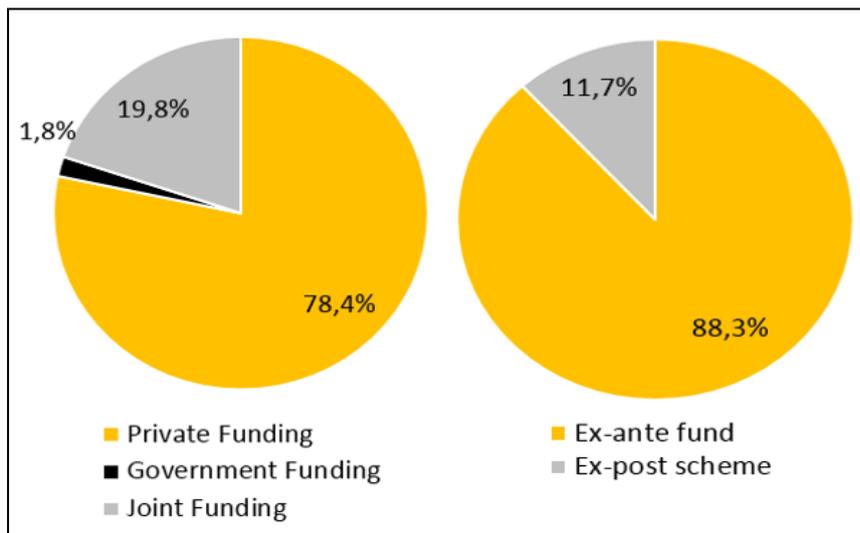


Sumber: Kunt et al (2015)

Gambar 8. Taksonomi Institusi Penjaminan Simpanan Berdasarkan Struktur dan Administrasi

Pendirian IPS di tiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda (bervariasi). Berdasarkan bentuknya, IPS dibedakan menjadi dua, yaitu eksplisit (*legally separate*) dan implisit (*hosted*). Penjaminan simpanan secara eksplisit dilaksanakan oleh lembaga yang memang secara

husus dibentuk untuk melaksanakan program penjaminan, misalnya seperti LPS di Indonesia. Sedangkan penjaminan simpanan secara implisit dilaksanakan tanpa melalui pendirian suatu lembaga khusus tetapi ditangani oleh suatu unit yang ada di Bank Sentral, Kementerian Keuangan atau Pengawas Bank, misalnya di negara Irlandia. Umumnya, negara-negara di dunia banyak mengadopsi sistem eksplisit (85,6%) dibandingkan hosted (14,4%). Skema penjaminan simpanan dikelola dengan sistem administrasi publik (65,8%) seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 8.



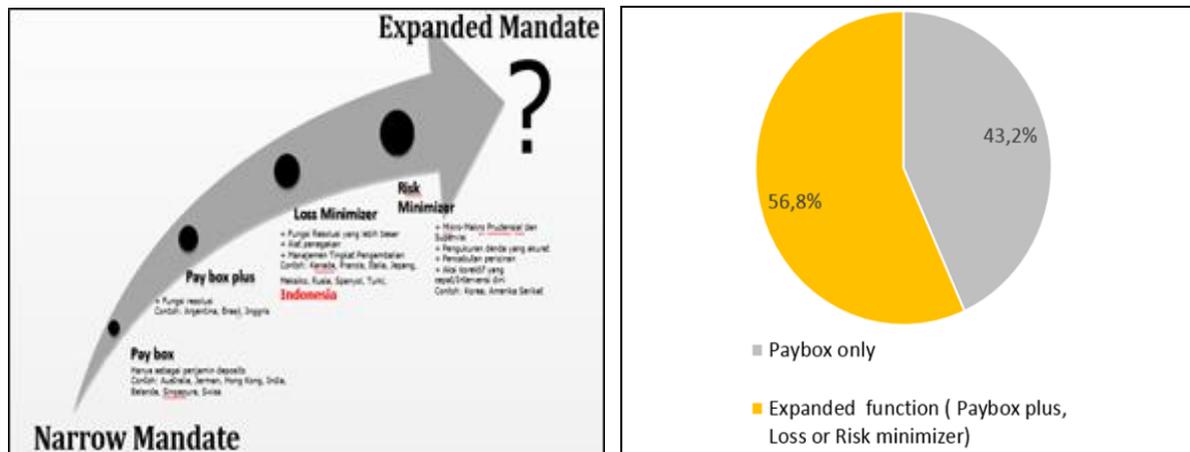
Sumber: Kunt et al (2015)

Gambar 9. Taksonomi Institusi Penjamin Simpanan Berdasarkan Karakter Pendanaan

Dilihat dari sistem *funding*-nya, sebanyak lebih dari 70% lembaga penjamin mendapatkan *funding* secara *private* yaitu menarik premi dari bank-bank peserta penjaminan. Sebagian lainnya yaitu hampir 20% melakukan *funding* dengan cara *joint funding* yaitu porsi pendanaan pertama berasal dari pemerintah dan sisanya dari bank-bank peserta penjaminan. Sedangkan kurang dari 2% negara-negara menjalankan sistem *funding*-nya secara *government funding* (berasal dari pemerintah). Mekanisme pendanaan juga dibagi menjadi *ex-ante* dan *ex-post*, dan negara-negara di dunia lebih banyak menggunakan sistem *ex-ante* yaitu pendanaan diperoleh sebelum bank-bank mengalami masalah insolvensi dengan cara mengambil premi (*accrued*). Sedangkan *ex-post* adalah sistem sebaliknya dimana pendanaan dikumpulkan setelah bank menjadi *insolvent*. Dalam kedua sistem ini, yang ditekankan adalah penilaian risiko terhadap kegagalan suatu bank dari premi yang ditarik dari tiap bank peserta penjaminan.

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa lembaga penjamin dan anggota jaring pengaman sistem keuangan mempunyai peran penting dalam industri perbankan. Penjaminan simpanan sendiri mempunyai mandat yang berbeda-beda di tiap negara. Secara garis besarnya, mandat IPS dibagi menjadi bersifat terbatas: *Paybox* dan bersifat lebih luas (*expanded*) sebagai "*Paybox Plus, Loss and Risk Minimizer*". Sebagai "*paybox*", IPS hanya memiliki mandat sebagai pembayar simpanan yang dijamin. Sedangkan dengan mandat yang diperluas seperti *paybox plus*, *loss minimizer* dan *risk minimizer*, IPS menambahkan fungsi resolusi dan manajemen risiko dan juga

mikro-makro prudensial. LPS di Indonesia telah memperluas fungsinya sebagai *loss minimizer* sesuai dengan mandat Undang-Undang yaitu turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Data menunjukkan bahwa lebih banyak negara yang mengadopsi IPS dengan *expanded mandate* dibandingkan hanya sekadar sebagai “*paybox*”.



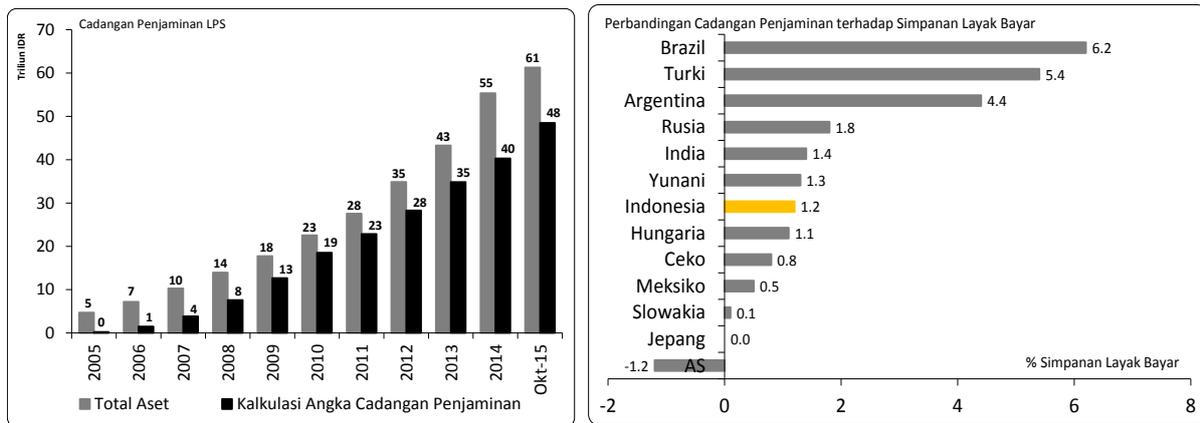
Sumber: IADI, LPS, Kunt et al (2015)

Gambar 10. Tipologi Penjaminan Simpanan Berdasarkan Mandat

Setiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib membayar kontribusi kepesertaan dalam bentuk premi penjaminan. Premi mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk cadangan risiko penjaminan, membiayai operasional penjaminan simpanan dan insentif untuk pengelolaan risiko yang lebih hati-hati. Premi di Indonesia ditetapkan sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode yang dibayarkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Hingga bulan Oktober 2015, total penerimaan premi mencapai Rp 51,86 triliun.

Di dalam sistem penjaminan simpanan, sebuah lembaga penjaminan simpanan diharuskan memiliki cadangan yang disebut dengan cadangan penjaminan untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai serta mudah dicairkan, yang digunakan untuk membayar klaim penjaminan. Cadangan penjaminan yang dimiliki LPS berasal dari akumulasi premi, dimana hingga bulan Oktober 2015 tercatat sebesar Rp 48 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 40 triliun. Jika dilihat dari amanat Undang-Undang, angka ini masih berada di bawah target sebesar 2,5% dari total simpanan. Cadangan penjaminan saat ini masih sekitar 1,09% dari total simpanan atau dengan kata lain untuk mencapai target 2,5% maka cadangan penjaminan LPS harus mencapai Rp 111,37 triliun.

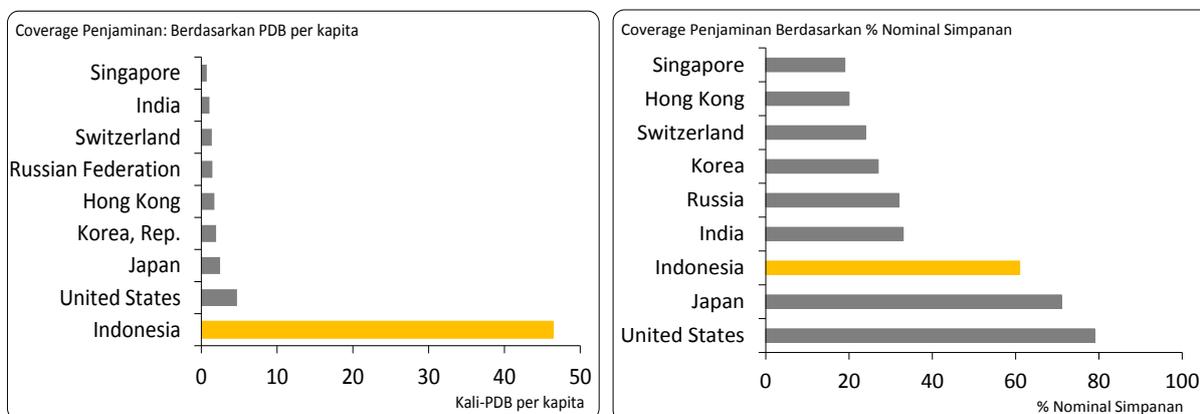
Rasio cadangan penjaminan terhadap simpanan layak bayar yang dimiliki LPS saat ini mencapai 1,2%, atau masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara *peers*-nya, seperti Rusia, India, Hungaria, dan Meksiko. Apabila LPS mengalami kesulitan likuiditas dalam hal membayar klaim penjaminan atau menangani resolusi bank gagal, maka LPS dapat memperoleh pinjaman dari pemerintah. Adapun ketentuan mengenai tingkat likuiditas LPS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Sumber: LPS dan IADI

Gambar 11. Cadangan Penjaminan LPS dan Perbandingan terhadap Simpanan Layak Bayar

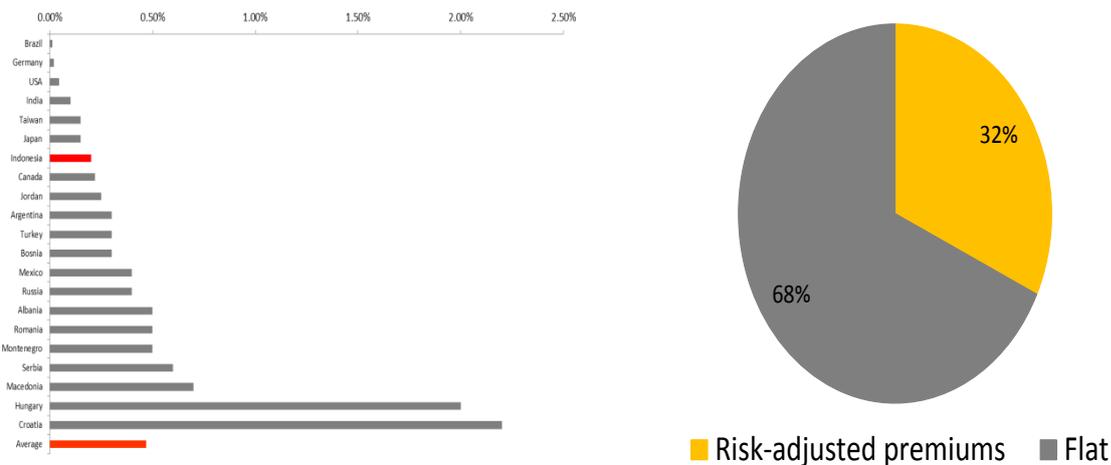
Jika dikaitkan dengan nilai PDB per kapitanya, dengan maksimum penjaminan sebesar Rp 2 miliar per nasabah per bank, maka nilai simpanan yang dijamin yang berlaku saat ini mencapai lebih dari 45 kali PDB per kapita. Angka ini dinilai sangat besar jika dibandingkan negara-negara lainnya yang pada umumnya berada di bawah 10 kali PDB per kapita. Sementara itu, cakupan penjaminan dari sisi nominal di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara *peers*, seperti Rusia dan India.



Sumber: LPS dan IADI

Gambar 12. Coverage Penjaminan: Berdasarkan PDB per kapita dan % Nominal Simpanan

Tingkat premi yang dibayarkan bank dibedakan menjadi dua, yaitu premi yang ditetapkan dengan persentase yang sama untuk semua bank (*flat rate premium*) dan premi yang didasarkan pada tingkat risiko kegagalan masing-masing bank (*risk based/differentiated premium*). Terdapat 68% negara yang sudah menggunakan sistem premi yang berbasis risiko sedangkan sebanyak 32% negara yang masih menggunakan sistem premi yang *flat*, termasuk Indonesia. Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara lain, tingkat premi penjaminan LPS masih rendah, bahkan berada di bawah rata-rata dunia.



Sumber: LPS dan IADI

Gambar 13. Perbandingan Tingkat Premi Maksimal serta Premi Berbasis Risiko dan *Flat*

Dalam menjalankan fungsi untuk memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS memiliki tugas utama yaitu resolusi: melakukan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Hingga bulan Oktober 2015, LPS tercatat telah melikuidasi 65 bank yang terdiri dari 1 Bank Umum dan 64 BPR/BPRS. Dari 65 bank tersebut, total aset yang dilikuidasi adalah sebesar Rp 459,6 miliar dan total simpanan yang dilikuidasi adalah sebesar Rp 1.275,83 miliar. Sementara itu, di tahun 2008, LPS telah melakukan penyelamatan terhadap bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik yaitu Bank Century, dalam hal ini LPS melakukan penyertaan modal sementara (PMS) serta mengambil alih mayoritas dari saham Bank Century.

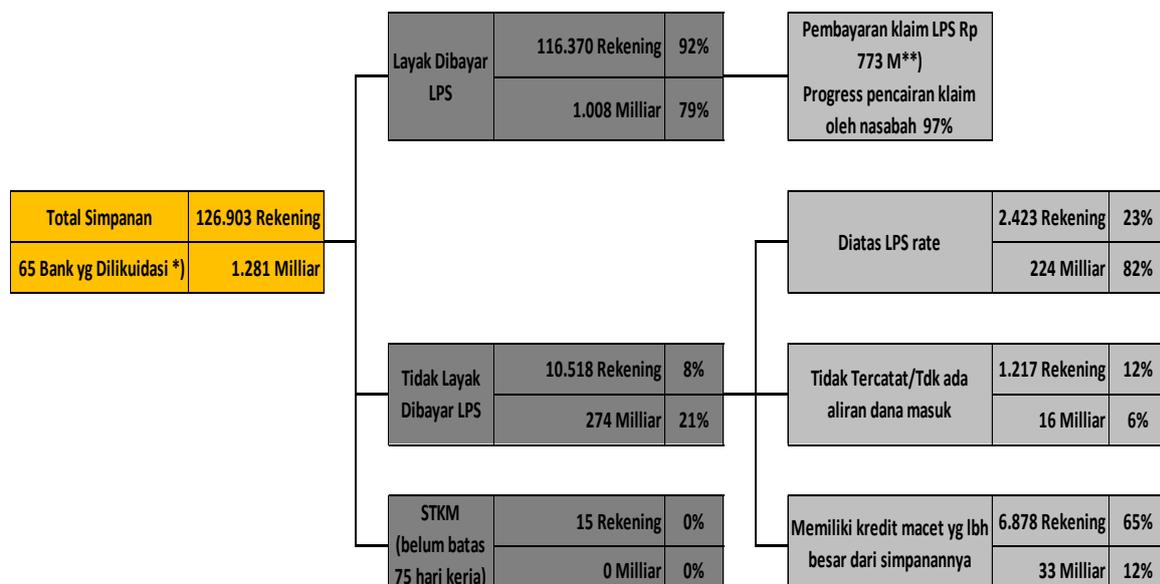
No	Uraian	s.d 2013	2014	s.d Okt-15	Total
1	Jumlah bank yang dilikuidasi	56	6	3	65
2	Total aset bank yang dilikuidasi (miliar IDR)	434	21.81	4.23	459.6
3	Total simpanan bank yang dilikuidasi (miliar IDR)	1,238.18	35.40	2.25	1,275.83
4	Jumlah bank yang telah berakhir likuidasinya	41	4	8	53
5	Penerimaan hasil pencairan likuidasi (miliar IDR)	180.4	106.6	12.2	298.5
6	Pengeluaran biaya likuidasi (miliar IDR)	45.9	15.3	7.1	68.1
7	Surplus (defisit) likuidasi (miliar IDR)	134.5	91.3	5.1	230.4
8	% pengembalian (recovery) dana penjaminan untuk bank yang berakhir likuidasi	21.64%	57.88%	96.75%	96.75%
	Akumulasi	11.37%	14.48%	30.24%	30.24%
9	Klaim yang layak bayar setelah batas penjaminan & set-off (jumlah rekening)	95,024	6,913	7,840	109,777
10	Klaim yang layak bayar setelah batas penjaminan & set-off (nilai rekening, miliar IDR)	738.22	26.96	7.73	772.91

Sumber: LPS (posisi Oktober 2015)

Tabel 2. Perkembangan Likuidasi dan Penanganan Klaim

Dari total simpanan sebesar Rp 1.281 miliar (atau 126.903 rekening) dari 65 bank yang dilikuidasi, jumlah simpanan yang layak dibayar LPS adalah sebesar Rp 1.008 miliar (atau 116.370 rekening), dengan *share* sebesar 79% dari total simpanan bank yang dilikuidasi. Sementara itu, jumlah simpanan yang tidak layak dibayar LPS adalah sebesar Rp 274 miliar (atau 10.518 rekening), dengan *share* sebesar 21%. Hingga bulan Oktober 2015, LPS tercatat telah membayar klaim penjaminan sebesar Rp 773 miliar (setelah perhitungan batas penjaminan dan *set-off* terhadap kewajiban).

Dari ketiga kriteria simpanan tidak layak dibayar, suku bunga simpanan yang diperoleh nasabah penyimpan di atas tingkat bunga penjaminan LPS (LPS rate) memiliki *share* paling tinggi sehingga menyebabkan simpanan menjadi tidak layak dibayar. Seperti kita lihat pada Gambar 14, sebanyak 82% atau Rp 224 miliar (2.423 rekening) nasabah penyimpan tidak layak bayar memperoleh suku bunga simpanan di atas LPS rate. Sementara itu, total nominal tidak layak bayar yang berasal dari tidak tercatat pada pembukuan bank serta kredit macet relatif kecil yaitu masing-masing sebesar Rp 16 miliar dan Rp 33 miliar.

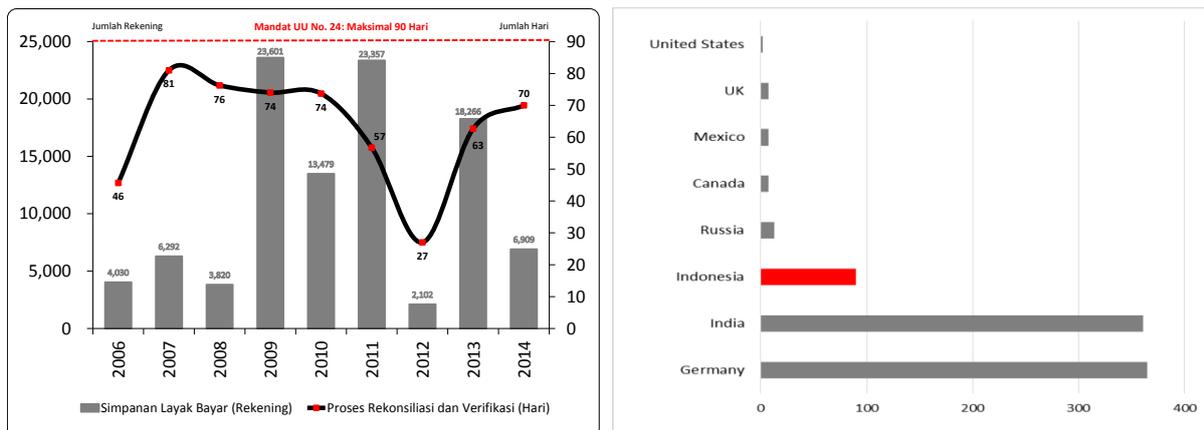


Sumber: LPS (posisi Oktober 2015)

Gambar 14. Kinerja Penanganan Klaim

Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Setelah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi (rekonver), LPS akan menentukan simpanan yang layak dibayar, selambat-lambatnya 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonver:

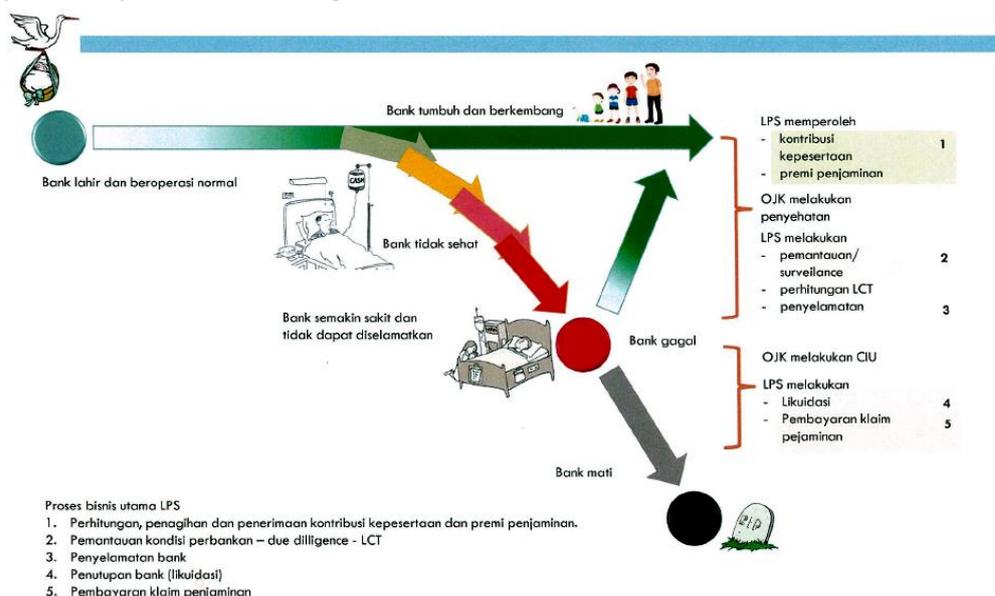
1. data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
2. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
3. nasabah penyimpan yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.



Sumber: LPS dan IADI

Gambar 15. Jangka Waktu Hari Pembayaran Klaim oleh LPS dan Rata-Rata Perbandingan dengan Lembaga Penjaminan Simpanan Negara Lain

Jika dibandingkan dengan lembaga penjaminan simpanan di negara lain, jangka waktu pembayaran klaim oleh LPS tergolong cukup singkat. Berdasarkan rekomendasi IADI, jangka waktu pembayaran klaim penjaminan adalah selama 7 hari dan 20 hari menurut pedoman Uni Eropa. Proses pembayaran klaim penjaminan yang singkat tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian kepada nasabah bank mengenai status simpanannya sehingga diharapkan dapat memberikan rasa tenang. Dalam perjalanannya, kinerja LPS dalam membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan tidak pernah melewati batas waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, pada tahun 2014 LPS telah menyelesaikan proses reconver dalam jangka waktu 70 hari dengan jumlah simpanan layak bayar sebanyak 6.909 rekening.



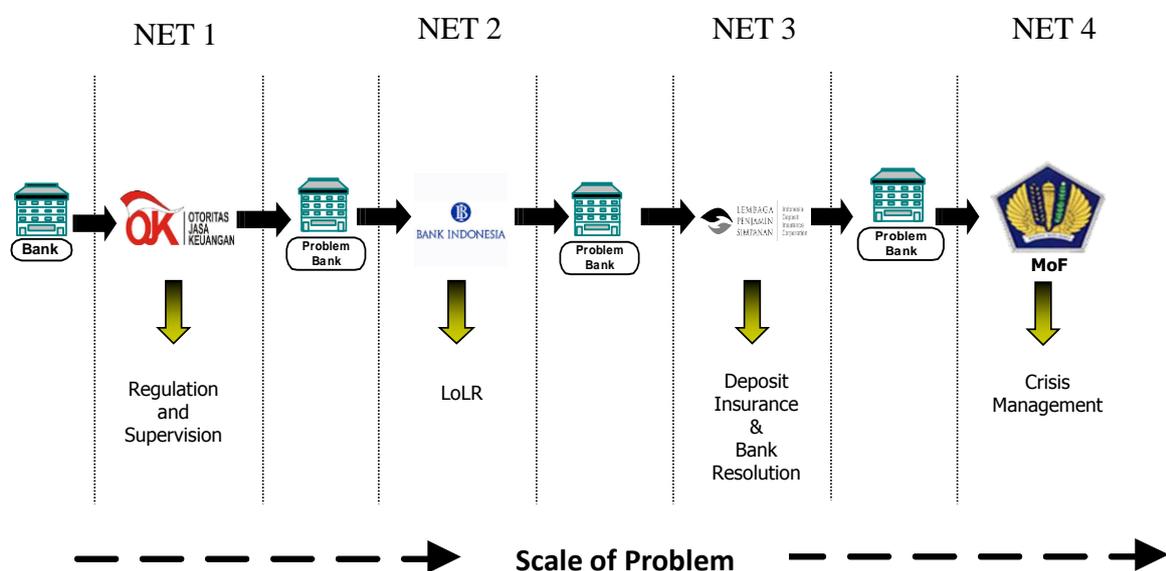
Sumber: LPS

Gambar 16. Proses Bisnis LPS pada Berbagai Fase Kehidupan Bank

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendirian LPS merupakan respon dari krisis yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan menurun pada titik terendah sehingga dibentuk sistem penjaminan yang terbatas yang dilaksanakan oleh LPS. Dalam perkembangannya hingga saat ini, peran LPS tidak akan lepas dari setiap siklus hidup bank. Bank yang sehat dapat terus beroperasi dengan normal dan tumbuh serta berkembang dengan baik, sehingga untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan maka LPS akan memperoleh kontribusi kepesertaan berupa premi penjaminan. Sedangkan pada saat bank bermasalah dan menjadi bank gagal, LPS akan melakukan tugasnya yaitu melakukan resolusi.

Dengan berkoordinasi bersama lembaga keuangan lain yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), LPS menjadi bagian penting dari jaring pengaman sistem keuangan (JPSK). JPSK sendiri memiliki peranan untuk mendorong dan mengawasi perbankan untuk mengelola keuangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, LPS bertindak sebagai *third line of defense* (pertahanan lapis ketiga). Dengan OJK sebagai penjaga gardu paling depan, memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi sistem perbankan yang sehat dan stabil, kemudian berdiri di belakangnya Bank Indonesia yang berperan dalam mengatur kebijakan secara makroprudensial, dari sisi moneter dan sistem pembayaran, serta menjadi *lender of last resort* (LoLR). Sebagai *third line of defense*, LPS bertanggung jawab dalam hal penjaminan simpanan nasabah penyimpan serta melakukan resolusi terhadap bank gagal. Kementerian Keuangan sebagai penjaga terakhir yang memiliki fungsi dalam pengelolaan situasi krisis.



Sumber: LPS

Gambar 17. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)



LPS sebagai suatu lembaga yang terus berkembang tentunya akan menghadapi sejumlah tantangan ke depannya. Skema penjaminan yang kredibel serta pilihan resolusi yang cepat, efektif, dan efisien dinilai akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Setelah dihapuskannya sistem *blanket guarantee* menjadi *limited guarantee* maka penentuan fitur penjaminan (batas maksimum simpanan yang dijamin dan tingkat bunga penjaminan LPS) yang kredibel adalah salah satu tantangan terbesar. Fitur skema penjaminan tersebut akan sangat tergantung pada kondisi stabilitas sistem keuangan. Fitur penjaminan yang terlalu longgar, akan berpotensi menimbulkan beban penjaminan yang terlalu besar dan meningkatkan risiko *moral hazard*. Sebaliknya, jika fitur penjaminan terlalu ketat, misalnya batas maksimum simpanan yang dijamin dan tingkat bunga penjaminan ditetapkan terlalu rendah, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Dalam situasi ini perbankan rentan mengalami *bank runs*.

Dalam melakukan fungsinya sebagai lembaga penangan bank gagal (Resolusi), tersedianya berbagai alternatif metode penanganan bank gagal dengan biaya yang efisien bagi LPS juga akan menjadi tantangan tersendiri. Saat ini LPS tengah mengkaji berbagai alternatif resolusi seperti: *purchase and assumption (P&A)*, *bridge bank*, dan sebagainya. Dalam literatur resolusi bank (De Young, 2013), dikenal beberapa metode/pendekatan, seperti metode P&A yang merupakan *best practice* yang biasa dilakukan oleh FDIC dengan mereorganisasi bank melalui penggabungan (*merger*) dengan entitas yang akan mengambil alih semua simpanan yang dimiliki oleh bank gagal tersebut. Metode ini memisahkan aset dan kewajiban bank menjadi *good asset* untuk dijual dan *bad asset* untuk dilikuidasi. Ada juga metode *bridge bank* yang merupakan pembentukan bank/entitas baru dimana *good asset* dari bank gagal dapat dimasukkan ke bank tersebut namun *bad asset* dapat dilakukan penanganan berupa dilikuidasi atau dilakukan penjualan ketika nilainya naik. Berbagai metode resolusi tersebut, dilakukan untuk memperoleh *recovery rate* yang optimal.

Most Preserved

↑

↓

Least Preserved

**Pemeliharaan
Bisnis Bank**

Metode Resolusi	Deskripsi
Open bank assistance (OBA)	Mengikutsertakan pemegang saham dengan modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan
Forbearance	Memungkinkan bank gagal untuk terus beroperasi, dengan mengikutsertakan manajemen yang lama
Bridge bank	Aset dan kewajiban bank yang dapat diselamatkan dimasukkan ke dalam entitas baru yang dibentuk
P & A	Memisahkan aset dan kewajiban bank menjadi good asset (dijual) dan bad asset (dilikuidasi)
Asset liquidation	Melikuidasi bad asset
Bail-in	Konversi instrumen utang bank menjadi ekuitas (modal) berdasarkan mekanisme kontrak atau kekuatan hukum dari Undang-Undang

Sumber: De Young et al (2013)

Tabel 3. Metode Resolusi

Sebagai salah satu bagian dari JPSK, LPS memiliki tantangan untuk terus berkoordinasi dengan lembaga keuangan lain dalam FKSSK. Dalam rangka menjaga stabilitas sistem perbankan, Rancangan Undang-Undang JPSK yang masih dalam tahap pembahasan dinilai dapat memberikan payung hukum yang kuat untuk melakukan pencegahan serta penanganan krisis perbankan. Jika Rancangan Undang-Undang JPSK tersebut ditetapkan, maka kemampuan resolusi krisis LPS akan memperoleh penguatan yaitu dengan memperluas pengembangan opsi penyelamatan bank gagal serta peningkatan cadangan penjaminan LPS yang saat ini masih berada di bawah mandat Undang-Undang.

Perbankan:
Optimis Memasuki Tahun 2016

Perbankan: Optimis Memasuki Tahun 2016

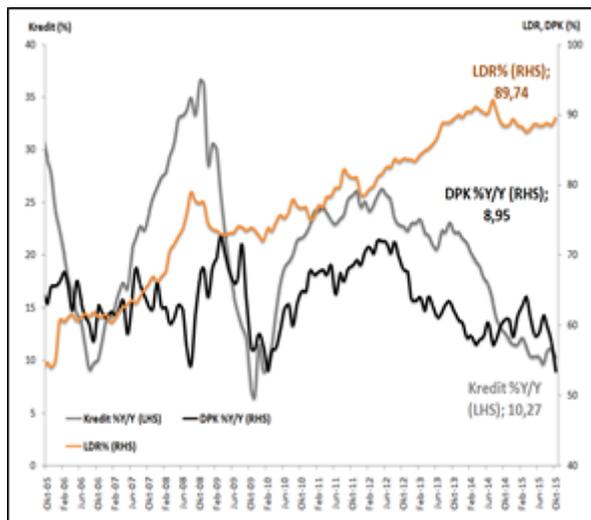
Seno Agung Kuncoro

- *Penyaluran kredit perbankan tumbuh 10,27% y/y pada bulan Oktober 2015, turun 73 bps dibandingkan bulan sebelumnya. Ini adalah penurunan terendah kedua setelah pertumbuhan pertengahan tahun sempat menyentuh angka di bawah 10%.*
- *Turunnya pertumbuhan nominal NPL terutama didorong oleh turunnya pertumbuhan kolektibilitas “Diragukan” yang selama ini meningkat signifikan dalam 12 bulan terakhir.*

Pergeseran *risk appetite* investor dalam beberapa bulan terakhir telah mendorong alokasi portofolio menjauh dari negara berkembang, yang menyebabkan turunnya harga aset pasar keuangan di Indonesia. Volatilitas nilai rupiah yang tinggi disertai melemahnya nilai tukar merupakan gejala awal dari tren yang membuat ruang kebijakan moneter menjadi terbatas. BI dengan sikap moneter yang relatif ketat, melakukan intervensi di pasar mata uang untuk menjaga volatilitas nilai tukar agar tidak terlalu tinggi serta mencegah depresiasi terlalu dalam.

Keputusan the Fed menaikkan suku bunga sebesar 25 bps di bulan Desember 2015, menjadi suatu berita positif di satu sisi. Stabilitas dan kepastian merupakan faktor yang dibutuhkan oleh banyak negara dalam menyusun rencana strategis untuk menjaga keberlangsungan (*sustainable*) pertumbuhan. Bagi industri keuangan, dampak pengumuman kenaikan Fed Rate, ternyata tidak terlalu buruk dalam kenyataannya. IHSG dibuka menguat sebesar 1,3% setelah pengumuman kenaikan Fed Rate, dan nilai tukar rupiah kembali stabil di level Rp 13.900.

Pertumbuhan kredit di periode Oktober 2015 masih stabil di angka 10% karena melemahnya permintaan, sementara dari sisi perbankan masih berhati-hati untuk ekspansif. Pertumbuhan kredit menurun dari 11,10% y/y pada bulan September menjadi 10,27% y/y pada bulan Oktober (lihat Gambar 18), tingkat terendah dalam 10 tahun terakhir. Sementara pertumbuhan kredit terus menurun, likuiditas perbankan masih tetap terjaga dengan rasio *loan to deposit ratio* (LDR) di level 89,74% pada Oktober 2015. Di sisi penawaran, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) merosot drastis menjadi 8,95% di Oktober, dimana pertumbuhan DPK pada bulan September masih di angka 11,72%. Kami perkirakan pada akhir tahun 2015 pertumbuhan kredit dan DPK akan kembali meningkat di kisaran 11-12%.



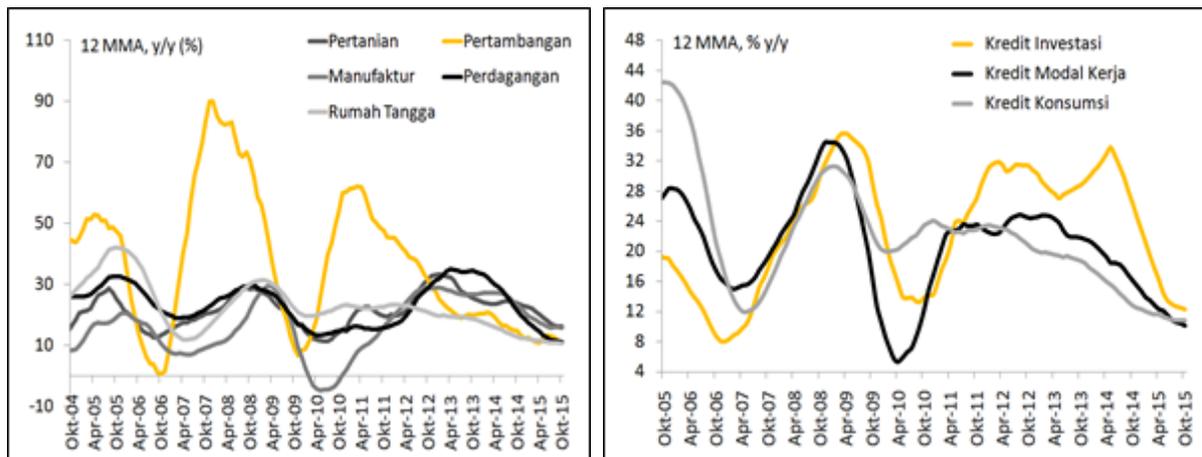
Periode	Deposits (IDR Bn)		Growth		Credit (IDR Bn)		Growth	
			%YoY	%MoM			%YoY	%MoM
2010	2.338.824		18,54		1.765.845		22,80	
2011	2.784.912		19,07		2.200.095		24,59	
2012	3.225.199		15,81		2.707.862		23,08	
2013	3.663.967		13,60		3.292.874		21,60	
Okt-14	4.011.369		13,93	0,39	3.558.070		12,62	(0,09)
Nop-14	4.054.680		13,79	1,08	3.596.614		11,89	1,08
2014	4.114.420		12,29	1,47	3.674.308		11,58	2,16
Jan-15	4.106.358		14,23	(0,20)	3.634.620		11,55	(1,08)
Feb-15	4.151.448		15,20	1,10	3.665.686		12,18	0,85
Mar-15	4.198.577		16,04	1,14	3.679.871		11,28	0,39
Apr-15	4.217.625		14,15	0,45	3.711.569		10,42	0,86
May-15	4.232.150		12,45	0,34	3.757.133		10,40	1,23
Jun-15	4.319.749		12,65	2,07	3.828.045		10,38	1,89
Jul-15	4.328.822		14,31	0,21	3.833.745		9,69	0,15
Aug-15	4.366.571		13,24	0,87	3.881.294		10,95	1,24
Sep-15	4.464.083		11,72	2,23	3.956.483		11,10	1,94
Oct-15	4.370.404		8,95	(2,10)	3.923.437		10,27	(0,84)

Sumber: CEIC dan OJK

Gambar 18. Pertumbuhan Kredit, Dana Pihak Ketiga, dan *Loan to Deposit Ratio*

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 10,27% y/y pada bulan Oktober 2015, turun 73 bps dibandingkan bulan sebelumnya. Ini adalah penurunan terendah kedua setelah pertumbuhan pertengahan tahun sempat menyentuh angka di bawah 10%. Pertumbuhan kredit terjadi pada semua jenis pinjaman. Kredit modal kerja yang mencapai 47% dari total kredit, tumbuh 9,08% y/y di bulan Oktober 2015 (lihat Gambar 19). Angka tersebut menurun dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 10,72%. Kredit investasi dengan bagian 25% dari total kredit, tumbuh 12,64% y/y pada bulan Oktober 2015, turun 31 bps dibandingkan pertumbuhan kredit investasi pada bulan September. Sementara kredit konsumsi dengan porsi 28% dari total penyaluran kredit tumbuh 10,23% y/y, naik 12 bps dari bulan sebelumnya dan menjadi penopang pertumbuhan kredit bulan Oktober 2015. Perlambatan pertumbuhan di semua jenis kredit tersebut adalah siklus di bulan Oktober yang memang menurun, dan akan mulai kembali meningkat di periode bulan November dan Desember.

Melambatnya pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi pada bulan Oktober 2015 salah satunya disebabkan volatilitas nilai rupiah masih cukup tinggi, yang membuat ketidakpastian bagi pelaku bisnis untuk beroperasi dengan normal. Berdasarkan jenis mata uang, kredit valuta asing (valas) mengalami penurunan signifikan dari 13,76% y/y di bulan September 2015 menjadi hanya separuhnya sebesar 6,11% pada bulan Oktober 2015. Sementara kredit rupiah mampu tumbuh 11,09% y/y, naik 53 bps dibanding bulan sebelumnya. Bila dilakukan *adjustment* untuk pertumbuhan kredit valas dengan nilai tukar berlaku, maka kredit valas mengalami kontraksi sebesar -6%. Fluktuasi nilai tukar yang tinggi sepanjang tahun 2015 tidak mengurangi permintaan terhadap kredit valas.



Sumber: CEIC

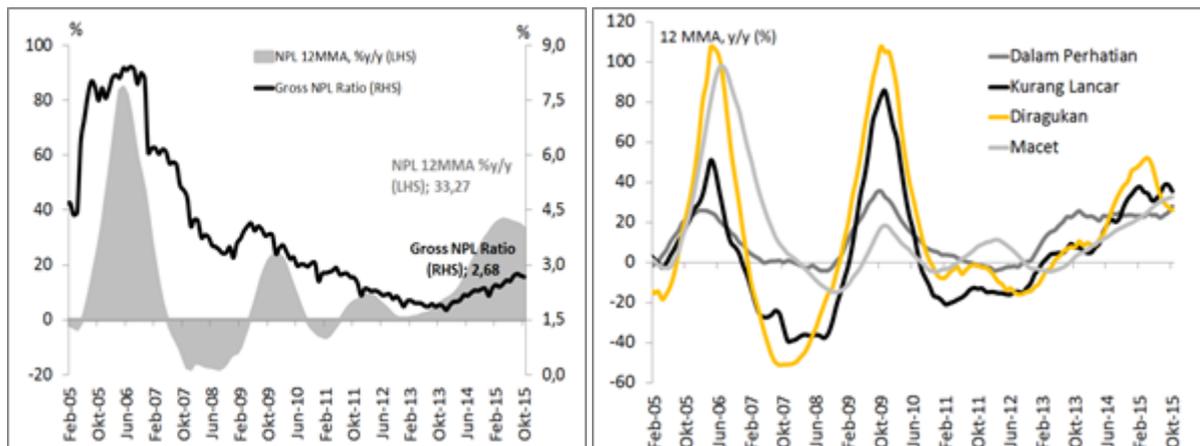
Gambar 19. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Sektor dan Jenis

Untuk jenis kredit berdasarkan sektor, sektor rumah tangga dan perdagangan sebagai sektor dominan pertumbuhannya sedikit menurun. Kredit sektor rumah tangga dengan porsi 29% dari total kredit, pada periode Oktober 2015 tumbuh sebesar 10,77% y/y turun 5 bps dari bulan sebelumnya. Sementara kredit sektor perdagangan pada periode Oktober 2015 tumbuh 11,17% y/y turun 26 bps dari periode sebelumnya.

Porsi penyaluran kredit sektor perdagangan relatif stabil sebesar 22% dari total kredit dalam 3 bulan terakhir dibandingkan penyaluran kredit ke sektor rumah tangga yang terus mengalami peningkatan dalam 3 bulan terakhir. Hal ini membuat intensitas persaingan antar bank di sektor rumah tangga menjadi semakin tinggi, karena perbankan lebih memilih untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor konsumsi sebagai dampak melemahnya perekonomian domestik.

Di satu sisi, porsi penyaluran kredit untuk sektor pertanian terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2015 dengan pertumbuhan sebesar 16,22% y/y. Pertumbuhan pinjaman kredit untuk sektor pertambangan terus mengalami penurunan seiring dengan turunnya harga komoditas dan batu bara di pasar global. Pada bulan Oktober 2015, kredit sektor pertambangan tumbuh sebesar 10,72% y/y dengan porsi portofolio kredit hanya sebesar 3% dari total kredit industri perbankan.

Pertumbuhan kredit yang moderat, juga disebabkan oleh industri perbankan yang semakin memperketat syarat penyaluran kredit. Kecemasan terhadap potensi kenaikan jumlah kredit bermasalah dari melambatnya pergerakan roda perekonomian akan mempengaruhi kinerja perbankan secara keseluruhan. *Non performing loan* (NPL) periode Oktober 2015 sebesar 2,68% (lihat Gambar 20) turun 3 bps dibandingkan periode September sebesar 2,71%. Sementara pertumbuhan NPL di periode Oktober 2015 mencapai 33,3% y/y dengan tren pertumbuhan yang mulai menurun selama 3 bulan terakhir.



Sumber: CEIC

Gambar 20. Rasio dan Pertumbuhan NPL

Turunnya pertumbuhan nominal NPL terutama didorong oleh turunnya pertumbuhan kolektibilitas “Diragukan” yang selama ini meningkat signifikan dalam 12 bulan terakhir (lihat Gambar 20). Kolektibilitas “Macet” juga menjadi *concern* dari industri perbankan karena memperlihatkan konsistensi peningkatan pertumbuhan nominal dari awal tahun 2013 di tengah pertumbuhan kredit yang melambat. Diperlukan analisis yang lebih mendalam oleh pelaku perbankan dan juga regulator untuk melihat apakah kenaikan kolektibilitas “Macet” tersebut lebih disebabkan oleh migrasi dari kolektibilitas “Diragukan” atau memang permasalahan mendasar dari kemampuan bayar debitur.

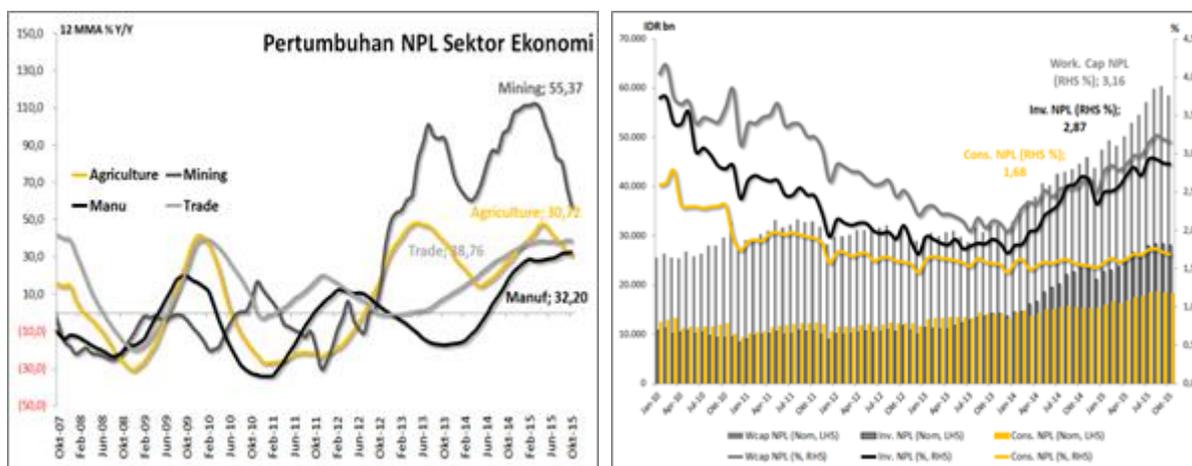
Penurunan kualitas kredit juga terlihat dari kolektibilitas nominal kredit yang menunjukkan tren meningkat pada semua kategori. Pertumbuhan tertinggi dari sisi kolektibilitas nominal kredit pada periode Oktober 2015 terdapat di kategori “Dalam Perhatian Khusus” sebesar 51,53% (lihat Tabel 4). Besarnya pertumbuhan kolektibilitas tersebut memperkuat indikasi bahwa pelaku usaha semakin tertekan oleh kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kategori kolektibilitas “Macet” pada Oktober 2015 tumbuh sebesar 34,11% y/y dan tercatat sebesar Rp 67,2 triliun. Pertumbuhan kolektibilitas nominal kredit “Kurang Lancar” yang pada periode-periode sebelumnya selalu berada di atas 20% pada Oktober 2015 terlihat mulai melambat.

	2012	2013	2014	Okt-14	Okt-15	YoY
Aset (Rp Mil)	4.262.587	4.954.467	5.616.150	5.344.224	5.893.338	10,27%
Kredit (Rp Mil)	2.707.862	3.292.874	3.674.308	3.558.070	3.923.437	10,27%
CKPN Kredit (Rp Mil)	65.389	83.240	83.240	83.909	107.125	27,67%
NPL (Rp Mil)	50.594	58.279	79.387	83.470	105.007	25,80%
Lancar	2.544.312	3.105.805	3.442.490	3.322.397	3.587.797	7,99%
DPK	112.955	128.790	152.430	152.203	230.633	51,53%
Kurang Lancar	9.272	10.247	14.278	19.102	20.887	9,34%
Diragukan	6.908	8.641	15.287	14.286	16.953	18,67%
Macet	34.414	39.391	49.822	50.082	67.167	34,11%
NPL (% to total loans)						
Kurang Lancar	0,34%	0,31%	0,39%	0,54%	0,53%	
Diragukan	0,26%	0,26%	0,42%	0,40%	0,43%	
Macet	1,27%	1,20%	1,36%	1,41%	1,71%	
Total NPL (%)	1,87%	1,77%	2,16%	2,35%	2,68%	
Rasio CKPN Kredit (%)	129,24%	142,83%	104,85%	100,53%	102,02%	

Sumber: OJK

Tabel 4. Rincian Data Perkembangan Kolektibilitas Kredit

Efek kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terkait stimulus bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yang ditujukan untuk menahan laju penurunan kualitas kredit sepertinya mulai memperlihatkan hasil. Tetapi perlu tetap diwaspadai *moral hazard* dari kebijakan tersebut, walaupun memiliki jangka waktu selama 2 tahun, terutama dampak *reversal* dari kebijakan stimulus yang akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan bila dilakukan tidak pada waktu yang tepat.



Sumber: OJK

Gambar 21. NPL Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Jenis Kredit

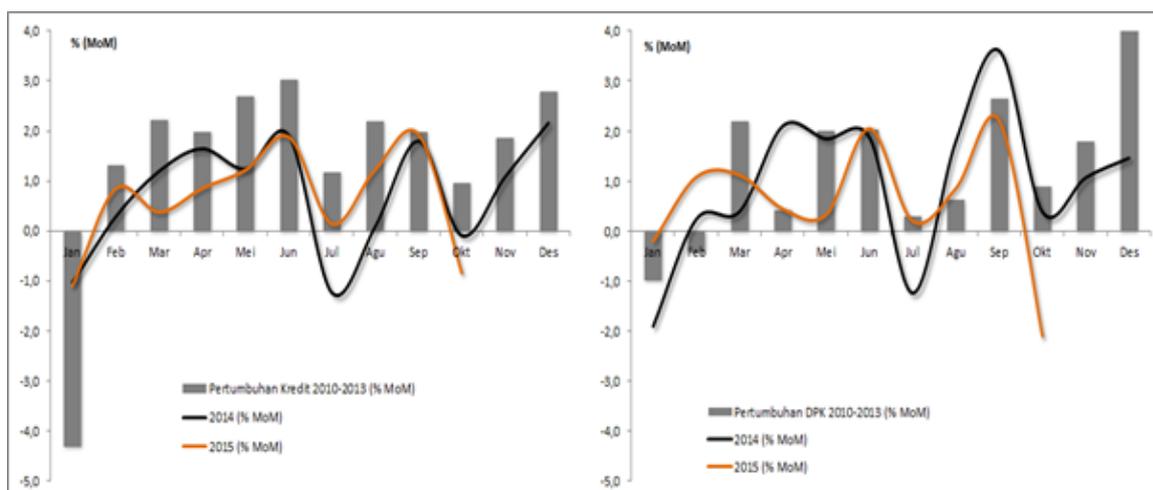
Sektor ekonomi yang menjadi kontributor terbesar terhadap kualitas kredit yang memburuk adalah, sektor konstruksi dengan NPL sebesar 4,79% pada bulan Oktober 2015, lalu sektor jasa transportasi, pergudangan dan telekomunikasi dengan NPL sebesar 4,12%, serta sektor perdagangan dengan NPL sebesar 4,04%. Bila dilihat dari jenis kredit, maka NPL kredit modal kerja masih

mendominasi sebesar 3,16% pada bulan Oktober 2015, dan NPL kredit investasi dan konsumsi masing-masing sebesar 2,87% dan 1,68%.

Pertumbuhan NPL nominal sektor perdagangan dan manufaktur terlihat masih dalam tren yang meningkat (lihat Gambar 21) sementara sektor pertambangan dan sektor pertanian pertumbuhan NPL nominalnya berada dalam grafik yang menurun. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh stabilnya jumlah kredit bermasalah yang disertai kenaikan penyaluran kredit pada sektor Pertambangan dan Pertanian selama 6 bulan terakhir. Sementara untuk NPL sektor Perdagangan dan Manufaktur, persentase pertumbuhan kredit pada kedua sektor tersebut lebih rendah dari persentase kenaikan jumlah NPL.

Sektor bisnis sudah berada dalam kesulitan ketika nilai tukar mencapai Rp 13.000, dan berada dalam situasi yang lebih sulit ketika nilai tukar telah lebih dari Rp 14.000. Kami melihat bahwa masih terdapat potensi peningkatan terhadap kredit macet. Pada waktu seperti saat ini perbankan jangan hanya bergantung pada kebijakan regulator, tetapi harus memberi perhatian lebih pada kemampuan untuk mengelola kualitas aset dan likuiditas bank dibanding mengejar pertumbuhan kredit. Pemerintah dan regulator keuangan sekarang berada dalam peran yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya beli masyarakat yang berada dalam tren menurun dalam satu tahun terakhir.

Likuiditas perbankan di awal kuartal IV 2015 patut dicermati karena adanya potensi likuiditas untuk mengetat. Rasio kredit terhadap simpanan atau LDR terlihat mengalami peningkatan 119 bps menjadi 89,74% pada Oktober 2015. Peningkatan LDR ini disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang menurun signifikan dan lebih rendah dari pertumbuhan kredit. Melihat pola dinamis di bulan Oktober dimana pertumbuhan kredit akan menurun, yang terlihat adalah pertumbuhan DPK turun signifikan dibanding penurunan pertumbuhan kredit (lihat Gambar 22). Kami perkirakan untuk mengurangi likuiditas yang berlebih, disamping untuk pembiayaan kredit, perbankan juga menaruh porsi lebih besar *idle fund* pada Surat Berharga Negara (SBN). Pada awal Oktober 2015, dana bank di SBN hanya sebesar Rp 398 triliun, sementara pada akhir Oktober 2015 berada pada posisi Rp 412 triliun.



Sumber: OJK

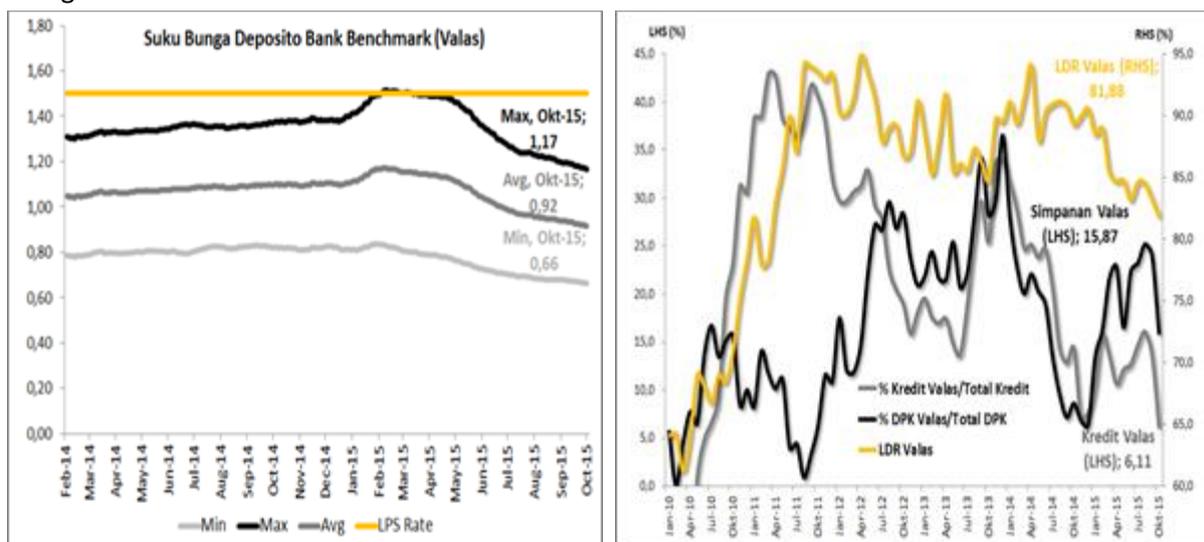
Gambar 22. Dinamika Pertumbuhan Kredit dan DPK

Pertumbuhan dana pihak ketiga yang melambat di periode Oktober 2015 kami perkirakan hanya sementara, dan akan kembali meningkat di bulan berikutnya. Masih tingginya kebutuhan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mendorong pemerintah untuk terus menerbitkan Surat Utang negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/SUKUK) melalui skema *private placement*. Bagi perbankan, adanya pilihan untuk menempatkan idle fund pada SBN cukup rasional mengingat imbal balik yang cukup baik. Dengan demikian kelebihan DPK dalam industri perbankan yang tidak tersalurkan dalam kredit, sepertinya terserap oleh pemerintah.

Di satu sisi, pada Oktober 2015 DPK mengalami pertumbuhan yang menurun menjadi 8,95% y/y dibanding pertumbuhan bulan September sebesar 11,72%. Melambatnya pertumbuhan tersebut didorong oleh simpanan Giro yang tumbuh sebesar 11,76% y/y, lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 19,29%. Untuk simpanan Deposito tumbuh 9,63% y/y di Oktober 2015, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 11,24%, sementara tabungan cenderung stabil yang tumbuh sebesar 6,01% y/y.

Sampai dengan saat ini, posisi bank umum yang berada di BUKU 4 masih kuat dari sisi penguasaan DPK. Kelompok BUKU 4 menguasai pangsa DPK mencapai 45%, dengan pangsa pasar dana murah (CASA) mencapai 55% dari total industri. Kelompok BUKU 2 dan BUKU 3 menguasai pangsa DPK sebesar 51%, dengan pangsa pasar dana murah sebesar 42% dari total industri. Sementara kelompok BUKU 1 hanya menguasai pangsa DPK sebesar 4%, dengan pangsa pasar dana murah hanya sebesar 3%.

Rasio *loan to deposit ratio* (LDR) sedikit meningkat menjadi 89,74% pada Oktober 2015 dari 88,54% pada bulan sebelumnya. LDR relatif stabil di bawah 90% dalam 14 bulan terakhir karena tren perlambatan pertumbuhan kredit. Meskipun pertumbuhan kredit menurun pada bulan Oktober, tetapi masih relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Bank umum yang memiliki rasio LDR mendekati 100% harus menghimpun lebih banyak dana jika tidak ingin mengalami masalah likuiditas.



Sumber: OJK

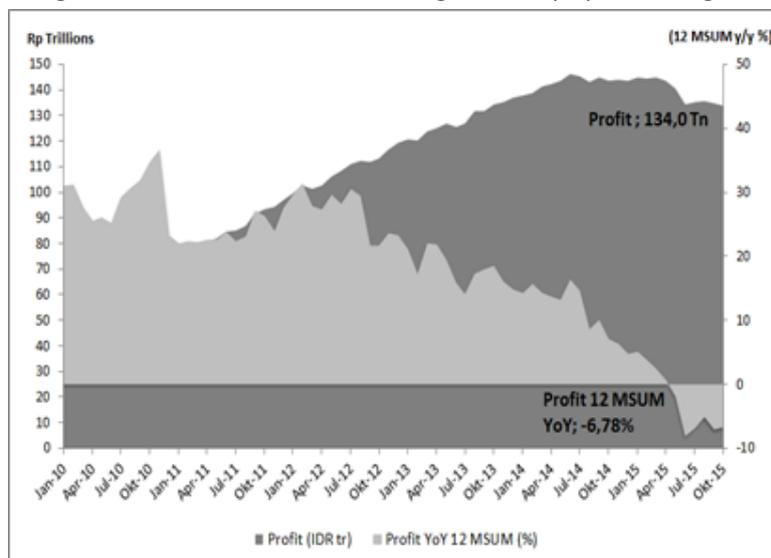
Gambar 23. Suku Bunga Pasar Valas dan Pertumbuhan Simpanan Valas

Suku bunga pasar valas masih memperlihatkan penurunan yang menjadi cerminan likuiditas valas yang masih longgar, serta langkah bank untuk menurunkan *cost of fund* (lihat Gambar 23). LPS telah melakukan penetapan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat turun 25 bps menjadi 7,50% dan 1,25% untuk simpanan rupiah dan valas di bank umum, serta 10,00% untuk simpanan di BPR. Tingkat bunga tersebut berlaku efektif mulai tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 14 Januari 2016.

Masih adanya risiko ketidakpastian dari perekonomian global, secara tidak langsung akan berdampak pada sektor perbankan di Indonesia. Posisi data bulan Oktober 2015 menunjukkan selama 6 bulan berturut-turut sektor perbankan mengalami kontraksi pertumbuhan laba y/y sebesar -6,78% (lihat Gambar 24). Bahkan untuk beberapa bank dengan skala aset menengah menghasilkan pertumbuhan laba yang negatif.

Penurunan laba tersebut disumbang oleh rendahnya pertumbuhan pendapatan bunga dibanding beban bunga, serta terutama dari peningkatan beban operasional selain bunga. Pertumbuhan pendapatan bunga sebesar 14,56% y/y di bulan Oktober 2015 terus melambat dibanding pertumbuhan beban bunga sebesar 17,14% y/y, sehingga pertumbuhan pendapatan bunga bersih hanya sebesar 11,81% y/y.

Dengan beban operasional selain bunga naik 30,83% y/y pada Oktober 2015, membuat laba bersih sektor perbankan mengalami kontraksi. Tingginya pertumbuhan beban operasional selain bunga tersebut terutama disumbang oleh biaya pencadangan kredit bermasalah.



Sumber: OJK

Gambar 24. Pertumbuhan Laba dan Laba Bersih

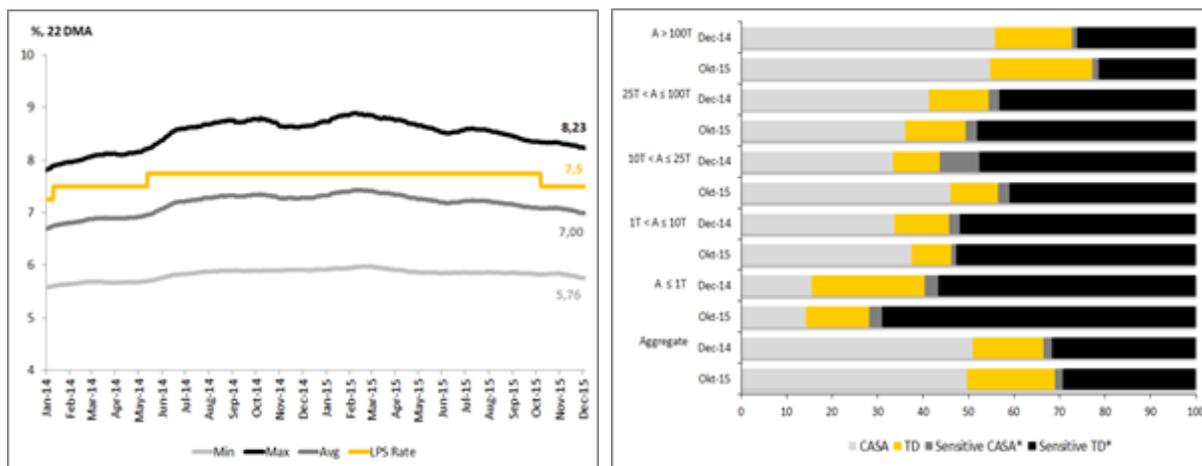
Untuk meningkatkan kinerja laba selain dari pendapatan bunga, perbankan juga mengandalkan pendapatan jasa (*fee based income*). *Fee based income* terbesar berasal dari transaksi *spot* dan derivatif, dividen, serta kutipan transaksional yang dilakukan oleh nasabah yang menggunakan infrastruktur jaringan ATM bank dan *e-channel* yang dimiliki oleh bank. Sampai

dengan Oktober 2015, pendapatan operasional di luar bunga tersebut mencapai 62% dari pendapatan bunga bersih bank. Tumbuh sebesar 28% dibanding periode yang sama tahun lalu y/y.

Manajemen bank melakukan penurunan *cost of fund* melalui instrumen suku bunga yang diturunkan untuk seluruh jenis simpanan, terutama deposito, dengan mempertahankan suku bunga kredit yang tinggi untuk mengkompensasi kenaikan *credit cost* yang timbul.

Dampak dari volatilitas nilai tukar akibat isu kenaikan Fed Rate, sepertinya masih menahan perbankan untuk ekspansi penyaluran kreditnya di awal kuartal IV. Karena pergerakan nilai tukar Rupiah secara tidak langsung akan berdampak akan kebutuhan modal kerja dan investasi dunia usaha.

Tren suku bunga bank *benchmark* yang dipantau LPS (suku bunga pasar) secara rata-rata hingga awal bulan Desember 2015 cenderung relatif stabil. Kami perkirakan hal tersebut berlanjut hingga akhir tahun 2015 karena intensitas persaingan perbankan dalam perebutan dana masyarakat relatif rendah. Sampai dengan awal Desember 2015, suku bunga deposito perbankan secara rata-rata turun sebesar 9 bps, dari 7,09% di akhir Oktober 2015 menjadi 7,00% (lihat Gambar 24). Di sisi lain, posisi suku bunga maksimum suku bunga deposito rata-rata perbankan pada periode yang sama relatif cenderung menurun menjadi 8,23%.



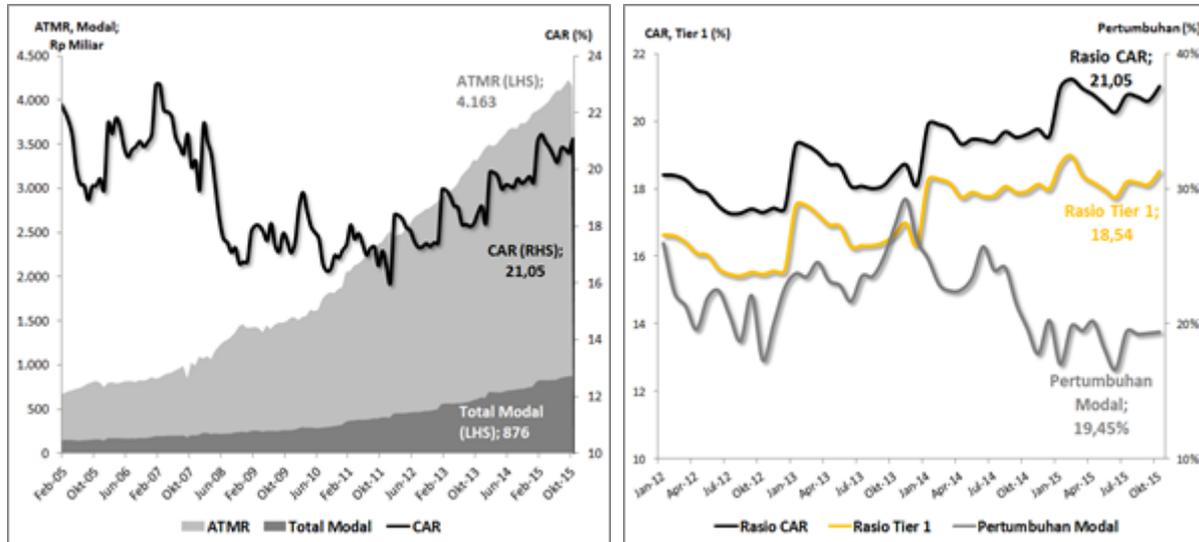
Sumber: OJK

Gambar 25. Suku Bunga Pasar Rupiah dan *Sensitive Funding*

Secara agregat terjadi pergeseran penurunan *sensitive* TD selama periode Desember 2014 sampai dengan Oktober 2015. *Gap sensitive* TD pada periode Oktober 2015 kembali menyempit setelah pada 6 bulan terakhir gap tersebut sempat melebar. *Sensitive* TD pada Desember 2014 sebesar Rp 1.031 triliun menjadi Rp 878 triliun pada Oktober 2015.

Kami perkirakan terdapat potensi peningkatan intensitas persaingan dalam perebutan dana simpanan, walau tidak akan seketat tahun 2014 lalu dan tidak terjadi pada semua level bank. Kategori bank sangat besar (BSB) yang memiliki aset di atas 100 triliun tidak cukup diuntungkan karena jumlah *sensitive* TD menurun signifikan untuk menekan *cost of fund*. Sedangkan untuk kelompok bank sangat kecil (BSK) relatif mengalami ekspansi *sensitive* TD. Peningkatan *sensitive* TD

pada kelompok bank sangat kecil disebabkan relatif belum dibatasinya suku bunga simpanan batas atas.



Sumber: OJK

Gambar 26. Perkembangan Permodalan Perbankan

Rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) relatif mengalami peningkatan dalam 3 bulan terakhir hingga berada di level 21,05% di periode Oktober 2015 (lihat Gambar 26). Adanya kebijakan peraturan OJK yang lebih longgar dalam penilaian aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) diperkirakan mulai diimplementasikan oleh perbankan.

Penurunan jumlah ATMR sebesar -1,61% m/m di bulan Oktober 2015 cukup signifikan untuk mengangkat level rasio CAR. Sementara total modal hanya meningkat sebesar 0,43% m/m. Begitupun dengan rasio modal tier-1 yang meningkat sebesar 40 bps dibanding bulan lalu menjadi sebesar 18,54% di periode Oktober 2015, masih cukup tinggi dibandingkan kebutuhan modal berdasarkan Basel 3.

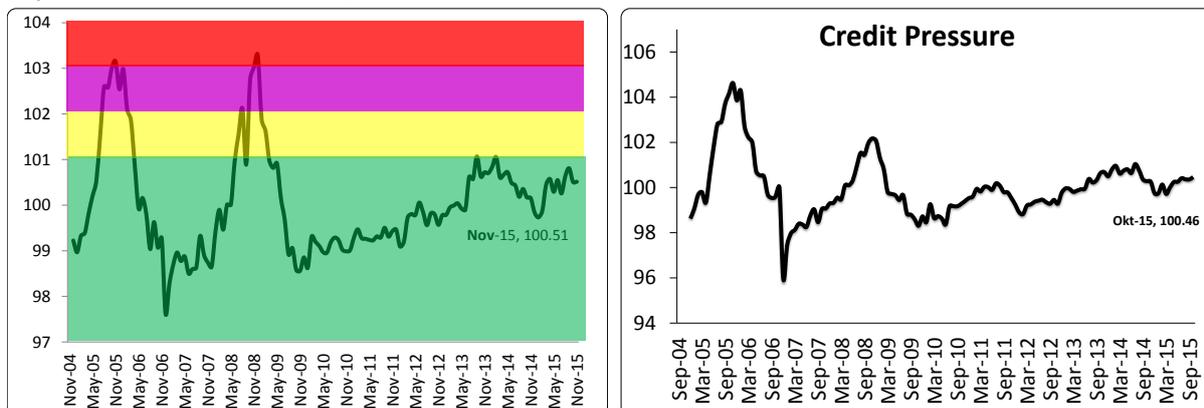
Update Indeks Stabilitas Perbankan

Indeks Stabilitas Perbankan (*Banking Stability Index*)

Hendra Syamsir

Meskipun berada dalam tren meningkat semenjak Januari 2015 dan sempat menyentuh angka tertinggi di 100,81 pada September 2015, Indeks Stabilitas Perbankan (BSI) pada bulan November 2015 kembali ke angka 100,51 (angka sementara). Angka BSI ini relatif tidak berubah dibandingkan dengan angka BSI pada bulan Oktober 2015 yang juga berada dalam level yang sama. Sesuai dengan kategori skala observasi BSI, angka ini menunjukkan kondisi risiko industri perbankan Indonesia masih berada dalam kondisi "Normal".

Terdapat peningkatan sebesar 10 bps dari sisi *Credit Pressure* dari 100,36 (September 2015) menjadi 100,46 (Oktober 2015). Di sisi *Market Pressure* (MP), tekanan terbilang stabil dengan nyaris tidak berubahnya indikator MP dari 101,13 menjadi 101,15 (angka Oktober ke November 2015). Di sisi *Interbank Pressure* (IP), terjadi penurunan sebesar 60 bps dari 100,83 menjadi 100,23 (angka September ke Oktober 2015).



Sumber: LPS

Gambar 27. *Banking Stability Index (BSI) dan Sub Indeks Credit Pressure (CP)*

Dari sisi NPL per Oktober 2015 terjadi sedikit penurunan dari September 2015 yaitu dari 2,71% menjadi 2,68%. Angka ini memang masih terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan angka NPL per Desember 2014 yang berada pada level 2,16%, namun demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata NPL selama 12 bulan terakhir yang berada pada level 2,52%. Hal ini tentu menunjukkan perbaikan di sisi pengelolaan aset perbankan.

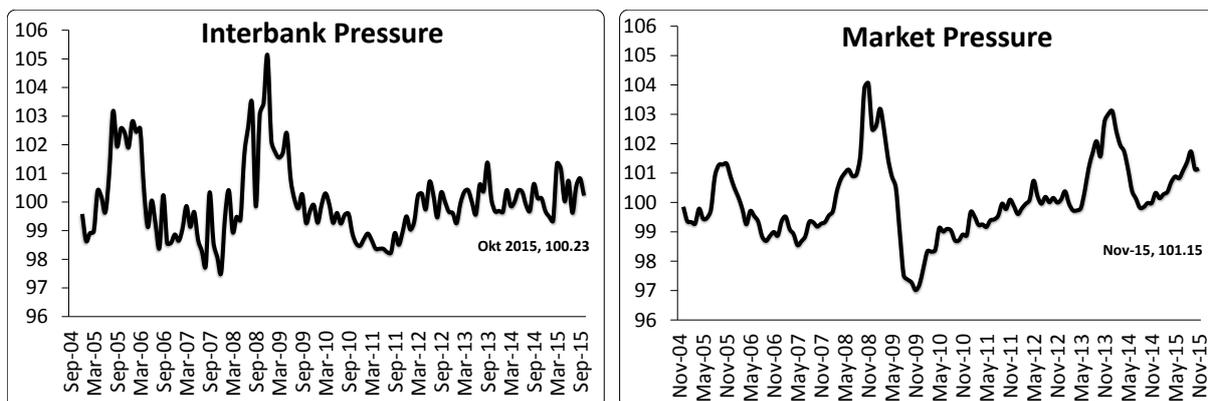
Dari sisi ROE, tren masih menunjukkan penurunan. Namun semenjak Juli 2015 angka penurunan ROE terhenti di level 14%-an, dimana pada bulan Oktober 2015 ROE perbankan berada pada level 14,9%. Hal ini kemungkinan terkait dengan upaya perbankan untuk mengelola NPL secara lebih baik.

LDR masih berada dalam tren peningkatan semenjak Maret 2015. Jika pada Maret 2015 angka LDR berada pada posisi 87,58%, maka pada Oktober 2015 angka LDR berada pada posisi 89,74%. Hal ini sejalan dengan hasil Survey Perbankan Bank Indonesia kuartal III 2015 yang menunjukkan bahwa terjadi kemungkinan pelemahan pertumbuhan DPK pada kuartal IV 2015

sebagai dampak dari penurunan suku bunga deposito. Masih menurut survey yang sama, rata-rata *cost of fund* pada kuartal IV 2015 diperkirakan akan turun sebesar 4 bps menjadi 6,76%.

Dari sisi bunga kredit rata-rata, angka pada bulan Oktober 2015 sama dengan angka pada bulan September 2015 yaitu pada 12,87%. Angka ini merupakan angka terendah selama 12 bulan terakhir. Hal ini sejalan dengan tren penurunan yang terjadi pada suku bunga dana. Sesuai dengan Survey Perbankan BI kuartal III 2015, penurunan bunga kredit yang dibarengi dengan perbaikan kondisi perekonomian membuat responden yakin bahwa pertumbuhan kredit pada kuartal IV 2015 akan semakin menguat, meskipun prinsip kehati-hatian tetap diutamakan mengingat masih adanya potensi risiko.

Terjadi penurunan yang cukup signifikan pada JIBOR O/N. Setelah menanjak ke posisi 7,1% pada bulan September 2015, angka JIBOR O/N turun ke posisi 5,6% pada Oktober 2015 dan turun kembali ke posisi 5,87% pada November 2015. Angka JIBOR ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata selama 12 bulan terakhir yang berada pada level 5,98%. Penurunan juga terjadi pada penyaluran dana antar bank riil yang turun 10 % dari bulan Oktober ke November 2015.



Sumber: LPS

Gambar 28. Sub Indeks *Interbank Pressure* (IP) dan *Market Pressure* (MP)

Dari sisi nilai tukar berdasarkan kurs tengah BI, pada bulan November 2015 terjadi depresiasi sebesar 1,4% dari Rp 13.639/US\$ pada Oktober 2015 menjadi Rp 13.840/US\$ pada November 2015. Angka ini memang masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata selama 12 bulan terakhir yang berada pada level Rp 13.344/US\$, namun jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka tertinggi selama 12 bulan terakhir yang mencapai Rp 14.657/US\$ pada bulan September 2015.

Angka Indeks Harga Saham Gabungan berdasarkan penutupan November 2015 yang berada pada 4.446,46 menunjukkan bahwa bursa cenderung stagnan dengan sedikit penurunan (0,19%) dibandingkan dengan angka penutupan pada bulan Oktober 2015. Meski secara keseluruhan selama 12 bulan terakhir angka ini menunjukkan bahwa bursa masih berada dalam kondisi *bearish*, namun demikian angka ini sudah menunjukkan perbaikan dari posisi terendah selama 12 bulan terakhir yang berada pada level 4.223,98 pada September 2015.

Dari sisi pasar utang, *Yield* Obligasi Negara bertenor 10 tahun pada bulan November 2015 menunjukkan penurunan sebesar 27 bps dari posisi 8,88% pada Oktober 2015 menjadi 8,61%



pada November 2015. Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan dengan *yield* 10 tahun rata-rata dalam 12 bulan terakhir yang berada pada level 8,18%, namun posisi ini menunjukkan penurunan selama 2 bulan berturut-turut semenjak posisi tertinggi selama 12 bulan terakhir yang terjadi pada bulan September 2015.



PENGARAH

Fauzi Ichsan, Salusra Satria

KOORDINATOR

Moch. Doddy Ariefianto, Hendra Syamsir, Seno Agung Kuncoro

ANALIS

Anmad Subnan Irani, Seto Wardono, Agus Afiantara, Dienda Siti Rufaedah, Citra Amanda

DESAIN & LAYOUT

Mutiara Aisyah

Laporan Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan ini dipublikasikan dalam rangka pelaksanaan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Tujuan penerbitan laporan ini adalah untuk meningkatkan wawasan dan kewaspadaan publik terhadap berbagai potensi risiko perekonomian dan sistem keuangan ke depan. Laporan Analisis Stabilitas dan Sistem Perbankan ini memuat hasil *monitoring* dan analisis Lembaga Penjamin Simpanan mengenai perkembangan ekonomi makro, pasar keuangan, perbankan, dan indeks stabilitas perbankan.

Pendapat / Saran / Komentar dapat ditujukan kepada :

Group Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan
Direktorat Penjaminan dan Manajemen Risiko
Equity Tower lantai 39
Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telp : +62 21 515 1000 ext 340

Email : rpsk@lps.go.id

Website : www.lps.go.id

Lampiran

Proyeksi Besaran Ekonomi Makro dan Perbankan Terpilih

Variabel	2012	2013	2014	2015P	2016P	2017P
Variabel Kunci						
PDB Nominal (Triliun Rp)	8,616	9,525	10,543	11,508	12,722	14,198
PDB Nominal (Miliar US\$)	918	914	888	858	908	1,014
PDB Riil (% y/y)	6.0	5.6	5.0	4.8	5.3	5.5
Inflasi (akhir periode, % y/y)	3.7	8.1	8.4	3.0	4.5	4.8
Inflasi (rata-rata, % y/y)	4.0	6.4	6.4	6.4	4.3	4.7
USD/IDR (akhir periode)	9,793	12,189	12,440	14,100	14,000	13,800
USD/IDR (rata-rata)	9,396	10,452	11,879	13,400	14,000	14,000
BI Rate (akhir periode)	5.75	7.50	7.75	7.50	7.50	7.50
Surplus/Defisit Fiskal (% PDB)	(1.8)	(2.2)	(2.2)	(2.4)	(2.4)	(2.4)
Sustainability Eksternal						
Ekspor Barang (% y/y)	(2.0)	(2.8)	(3.7)	(14.2)	(4.5)	0.7
Ekspor Barang (Miliar US\$)	187.3	182.1	175.3	150.4	143.6	144.6
Impor (% y/y)	13.6	(1.3)	(4.5)	(19.1)	(2.4)	2.7
Impor (Miliar US\$)	178.7	176.3	168.3	136.1	132.8	136.4
Neraca Berjalan (Miliar US\$)	(24.4)	(29.1)	(27.5)	(17.5)	(20.8)	(25.1)
Neraca Berjalan (% PDB)	(2.7)	(3.2)	(3.1)	(2.0)	(2.3)	(2.5)
Cadangan Devisa (Miliar US\$)	112.8	99.4	114.3	101.9	104.4	110.1
Utang Luar Negeri (% PDB)	27.5	29.1	33.1	35.2	37.5	36.3
PDB Riil menurut Pengeluaran (% y/y)						
Konsumsi Swasta	5.5	5.4	5.1	4.9	5.1	5.2
Konsumsi Pemerintah	4.5	6.9	2.0	4.2	4.4	5.0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.1	5.3	4.1	4.4	5.1	5.1
Ekspor Barang dan Jasa	1.6	4.2	1.0	(0.6)	1.9	4.4
Impor Barang dan Jasa	8.0	1.9	2.2	(5.1)	(0.2)	5.6
PDB Riil menurut Industri (% y/y)						
Sektor Primer	3.9	3.2	2.7	2.1	2.4	2.8
Sektor Sekunder	5.6	4.5	4.6	4.3	4.4	4.8
Sektor Tersier	6.8	6.4	6.2	5.7	6.0	6.3
Yield SUN Rupiah (rata-rata, %)						
1 Tahun	4.6	5.7	6.9	7.2	6.9	6.5
3 Tahun	5.1	5.9	7.6	7.8	7.3	7.1
5 Tahun	5.4	6.0	7.9	8.0	7.8	7.5
10 Tahun	6.0	6.5	8.2	8.2	8.2	7.9
20 Tahun	6.8	7.3	8.7	8.4	8.7	8.3
Perbankan (% y/y)						
Pinjaman	23.1	21.6	11.6	11.7	13.0	14.4
Dana Pihak Ketiga	15.7	13.6	12.3	12.7	12.3	12.6
Loan to Deposit Ratio (%)	84.0	89.9	89.3	88.5	89.1	90.5

**Jadwal Rilis Data dan Peristiwa Penting 1 Januari - 31 Januari 2016**

Negara	Tanggal	Indikator/Peristiwa
Amerika Serikat	7-Januari-16	Rilis FOMC Meeting 15-16 Desember 2015
	8-Januari-16	Tingkat Pengangguran Desember 2015
	20-Januari-16	Inflasi Desember 2015
Zona Euro	14-Januari-16	Suku Bunga Acuan
	15-Januari-16	Neraca Perdagangan November 2015
	19-Januari-16	Transaksi Berjalan November 2015
Jepang	12-Januari-16	Transaksi Berjalan November 2015
	25-Januari-16	Neraca Perdagangan Desember 2015
	29-Januari-16	Suku Bunga Acuan
Brazil	5-Januari-16	Neraca Perdagangan Desember 2015
	26-Januari-16	Transaksi Berjalan Desember 2015
	28-Januari-16	Rilis COPOM Meeting
	28-Januari-16	Tingkat Pengangguran Desember 2015
Rusia	12-Januari-16	Inflasi Desember 2015
	15-Januari-16	Neraca Perdagangan November 2015
India	8-Januari-16	Neraca Perdagangan Desember 2015
	12-Januari-16	Inflasi Desember 2015
China	9-Januari-16	Inflasi Desember 2015
	19-Januari-16	PDB 4Q15
Afrika Selatan	20-Januari-16	Inflasi Desember 2015
	28-Januari-16	Suku Bunga Acuan
Indonesia	4-Januari-16	Inflasi Desember 2015
	6-Januari-16	Cadangan Devisa Desember 2015
	15-Januari-16	Neraca Perdagangan Desember 2015

